

**SINERGISITAS BAZNAS, PEMERINTAH DAN  
MASYARAKAT PONOROGO DALAM PENYEDIAAN  
RUMAH LAYAK HUNI  
BAGI MUSTAHIK**

**TESIS**



**Oleh:**

**Yuni Ahad Diana**

**NIM: 501220028**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PONOROGO  
PASCASARJANA  
2024**

**SINERGISITAS BAZNAS, PEMERINTAH DAN  
MASYARAKAT PONOROGO DALAM  
PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI  
BAGI MUSTAHIK  
TESIS**

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah  
Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)  
Program Studi Ekonomi Syariah**



**Oleh:**

**Yuni Ahad Diana**

**NIM. 501220028**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PONOROGO  
PASCASARJANA**

**2024**

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, **Yuni Ahad Diana, NIM 501220028, Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul **“Sinergisitas Baznas, Pemerintah Dan Masyarakat Ponorogo Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Mustahik”** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja – kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana tiap tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung-jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, Mei 2024

Pembuat Pernyataan



**YUNI AHAD DIANA**  
**NIM. 501220028**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PASCASARJANA**

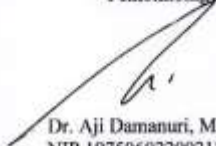
Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016  
Alamat: Jl. Pramuka No. 156, Po Box 116 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax (0352) 461893  
Website: [www.iainponorogo.ac.id](http://www.iainponorogo.ac.id) Email: [pascasarjana@iainponorogo.ac.id](mailto:pascasarjana@iainponorogo.ac.id)

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Yuni Ahad Diana, NIM 501220028**, dengan judul : **"Sinergisitas Baznas, Pemerintah dan Masyarakat Ponorogo dalam Penyediaan Hunian Layak bagi Mustahik"**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munaqashah Tesis

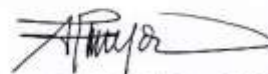
Pembimbing I,



Dr. Aji Damanuri, M.E. I  
NIP 197506022002121003

Ponorogo, 28 Mei 2024

Pembimbing II,



Dr. Amin Wahyudi, S.Ag. M.E.I  
NIP 197502072009011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PASCASARJANA

Terekrutasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/AK-SURV/PT/XI/2016  
Alamat: Jl. Pranyoka 136 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893  
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjanat@ponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Yuni Ahad Diana**, NIM 501220028 Program Magister Program Sudi Ekonomi Syariah dengan judul: **"Sinergisitas Baznas, Pemerintah dan Masyarakat Ponorogo dalam Penyediaan Hunian Layak bagi Mustahik"**, telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munawqashah* Tesis Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari Selasa, 28 Mei 2024 dan dinyatakan lulus

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP 197711112005012003 Ketua Sidang		20 Juni 2024
2	Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D. NIP 196906241998031002 Penguji Utama		6 Juni 2024
3	Dr. Aji Damanuri, M.E.I. NIP 197506022002121003 Pembimbing 1/Penguji		10 Juni 2024
4	Dr. Amin Wahyudi, M.E.I. NIP 197502072009011007 Pembimbing 2/ Sekretaris		15 Juni 2024

Ponorogo, 26 Juni 2024

Direktur Pascasarjana,

Dr. Muji Tasrif, M.Ag.  
NIP 197401081999031001



## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

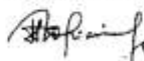
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Ahad Diana  
NIM : 501220028  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Pascasarjana  
Judul Tesis : Sinergisitas Baznas, Pemerintah Dan Masyarakat Ponorogo  
Dalam Penyediaan Hunian Layak Bagi Mustahik

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan LAIN Ponorogo yang dapat diakses [ethesis.lainponorogo.ac.id](https://ethesis.lainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 26 Juni 2024



**YUNI AHAD DIANA**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuni Ahad Diana  
NIM : 501220028  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada IAIN Ponorogo atas karya ilmiah saya yang berjudul: Sinergisitas Baznas, Pemerintah dan Masyarakat Ponorogo dalam Penyediaan Hunian Layak Bagi Mustahik. Dengan ini IAIN Ponorogo berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ponorogo  
Pada Tanggal : 26 Juni 2024

10000  
MELAYU  
TAMPEL  
182519786  
nyatakan  
  
YUNI AHAD DIANA

# **SINERGISITAS BAZNAS, PEMERINTAH DAN MASYARAKAT PONOROGO DALAM PENYEDIAAN HUNIAN LAYAK BAGI MUSTAHIK**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini mendeskripsikan sinergi antara Baznas, pemerintah dan masyarakat Ponorogo dalam penyediaan hunian layak. Dilatarbelakangi keberadaan Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Ponorogo di tengah masyarakat dengan berbagai programnya. Salah satu program Baznas Ponorogo adalah Ponorogo Peduli yang antara lain diwujudkan dalam bentuk bantuan untuk hunian menjadi lebih layak. Bantuan untuk hunian tersebut berupa program bedah rumah dan program plesterisasi lantai. Sampai saat jumlah mustahik yang terbantu dengan dua program tersebut sudah banyak dan hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Penyaluran kedua program tersebut dilaksanakan secara sinergi antara Baznas, pemerintah dan masyarakat Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinergi antara Baznas, pemerintah dan masyarakat Ponorogo dalam hal komunikasi yang efektif. Selain itu peneliti ingin mengetahui bagaimana kolaborasi antara Baznas, pemerintah dan masyarakat Ponorogo dalam penyediaan hunian layak. Dan berikutnya melalui program bedah rumah dan plesterisasi lantai yang tersebar di kabupaten Ponorogo, peneliti ingin mengetahui apa dampak sinergisitas antara Baznas, pemerintah dan masyarakat Ponorogo dalam penyediaan hunian layak bagi mustahik. Jenis penelitian ini yaitu penelitian



lapangan. yang bersifat kualitatif dengan sumber data dari literatur dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak Baznas, pemerintah (pemerintah desa/kelurahan) dan juga mustahik penerima bantuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bedah rumah dan plesterisasi lantai atau program penyediaan hunian layak yang dilakukan secara sinergi antara Baznas, pemerintah dan masyarakat Ponorogo dalam hal komunikasi dapat berjalan efektif dan efisien, walaupun masih ada hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan dalam komunikasi efektif antara lain faktor kondisi geografis, faktor fisik mustahik, dan faktor masih tergantung kepercayaan lokal. Sedangkan dalam hal kolaborasi masih kesulitan dan belum berjalan lancar karena anggaran yang terbatas, jumlah pemohon banyak, dan banyak SHM rumah mustahik yang masih atas nama keluarga. Dampak positif dari sinergisitas yakni rasa percaya diri mustahik dan kesejahteraan ekonomi mustahik meningkat. Sedangkan dampak negatifnya etos kerja mustahik banyak yang menurun akibat banyak bergantung pada bantuan dan masyarakat sekitar bantuan dapat timbul rasa iri hati karena tidak menerima bantuan yang sama.

**Kata kunci : Sinergisitas; Hunian Layak;Mustahik**

**SYNERGISTICITY OF BAZNAS, GOVERNMENT  
AND PONOROGO COMMUNITY IN PROVIDING  
DECENT HOUSING FOR MUSTAHIK  
ABSTRACT**

*This research describes the synergy between Baznas, the government and the people of Ponorogo in providing decent housing. The background is the existence of the Ponorogo National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in the community with its various programs. One of Baznas Ponorogo's programs is Ponorogo Cares, which, among other things, is realized in the form of assistance to make housing more adequate. Assistance for housing is in the form of a house renovation program and a floor plastering program. To date, the number of mustahik who have been helped by these two programs has been large and almost evenly distributed in all sub-districts in Ponorogo Regency. The distribution of these two programs is carried out in synergy between Baznas, the government and the people of Ponorogo. This research aims to find out the synergy between Baznas, the government and the Ponorogo community in terms of effective communication. Apart from that, researchers want to know how the collaboration between Baznas, the government and the people of Ponorogo is in providing decent housing. And next, through a house renovation and floor plastering program spread across Ponorogo district, researchers want to know the impact of the synergy between Baznas, the government and the people of Ponorogo in providing decent housing for mustahik. This*

*type of research is field research. which is qualitative in nature with data sources from literature and interviews. Interviews were conducted with Baznas, the government (village/district government) and also mustahik recipients of aid.*

*The research results show that the house renovation and floor plastering program or the program for providing adequate housing which is carried out in synergy between Baznas, the government and the people of Ponorogo in terms of communication can run effectively and efficiently, although there are still obstacles in its implementation. Barriers to effective communication include geographical conditions, physical factors that are difficult, and factors that still depend on local beliefs. Meanwhile, in terms of collaboration, there are still difficulties and it is not running smoothly because the budget is limited, the number of applicants is large, and many SHM for mustahik houses are still in the name of the family. The positive impact of synergy is that mustahik's self-confidence and mustahik's economic welfare increase. Meanwhile, the negative impact is that many mustahik's work ethic decreases due to being too dependent on aid and the community around the aid can create feelings of envy because they do not receive the same aid.*

***Keywords: Synergy; Decent Housing; Mustahik***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Mempunyai hunian yang layak adalah hak setiap warga Indonesia. Rumah sebagai hunian adalah kebutuhan primer atau kebutuhan dasar setiap manusia. Meski begitu, memilih rumah yang layak huni dan nyaman tidak semudah mempertimbangkan jenis, desain, dan tipe rumah saja. Di beberapa negara yang masih menghadapi masalah ekonomi berkepanjangan, misalnya Indonesia, sebagian besar masyarakatnya masih kesulitan untuk mendapatkan

rumah layak huni.<sup>1</sup> Rumah tinggal memiliki peran strategis untuk membentuk tabiat dan kepribadian bangsa demi membangun insan Indonesia seutuhnya. Untuk itu, menjadi tugas serta tanggung jawab negara agar setiap warga bisa menghuni tempat tinggal yang layak dalam lingkungan sehat, aman, serasi dan teratur. Namun pada kenyataannya, masih terdapat beberapa hambatan dalam penyediaan perumahan, yaitu adanya ketimpangan antara pemasukan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan.<sup>2</sup> Beberapa alasannya adalah jumlah pengangguran yang tinggi dan pendapatan yang masih rendah, sehingga

---

<sup>1</sup> Shandy Pradana, *Definisi serta Kriteria Rumah Layak Huni dan Tidak*, Rumah 123.com (2023)

<sup>2</sup> Oswar Mungkasa, *Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia*, Direktorat Permukiman dan Perumahan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Jakarta, 2008

masyarakat kelas bawah mencari tempat tinggal seadanya atau terpaksa membangun rumah yang tidak layak huni.

Rumah layak huni atau RLH merupakan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Definisi RLH diatur pada UU 1 tahun 2011 perihal Perumahan serta tempat Permukiman (PKP) Pasal 24 a. Setidaknya terdapat beberapa kriteria yang menghasilkan sebuah rumah layak huni. RLH mempunyai 2 derajat kelayakan yakni kualitas fisik yg mencakup 3 variabel, seperti jenis atap, jenis dinding serta jenis lantai. Adapun kelayakan yang diukur berasal fasilitas rumah seperti luas lantai per kapita, dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC)/MCK

Rumah layak huni wajib mempunyai struktur konstruksi yang bertenaga kuat, luas bangunan yang ideal, sanitasi yang baik, dan ketersediaan air bersih pada tempat tinggal tersebut. Tentunya, hal ini semakin menjadi pekerjaan besar mengingat generasi milenial mulai kesulitan untuk membuat rumah layak huni. Ini karena pertumbuhan populasi generasi millennial yang berjalan beriringan dengan meningkatnya kebutuhan perumahan layak huni serta terjangkau pada masa mendatang.<sup>3</sup> Untuk mengatasinya, Kementerian PUPR mencoba membuat model rumah tempat tinggal bersubsidi dan sistem perumahan publik berbentuk tempat tinggal susun atau rusun terutama di kota-kota besar.

---

<sup>3</sup> Shandy Pradana, *Definisi serta Kriteria Rumah Layak Huni dan Tidak, Rumah 123.com* (2023)

Rumah tinggal tidak layak huni atau yang biasa disingkat RTLH artinya rumah yang belum memenuhi persyaratan tempat tinggal layak huni. Umumnya, RTLH memiliki konstruksi bangunan yang tidak kuat, luasnya tidak sinkron baku hunian per orang, lingkungan tidak menyehatkan dan /atau membahayakan bagi penghuninya. Kelayakan tempat tinggal pun umumnya diukur dari dua aspek, yaitu kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. RTLH biasanya tidak memenuhi dua aspek tersebut. Jika dijabarkan, kriteria rumah tidak layak huni adalah sebagai berikut yaitu rumah dengan konstruksi bangunan yang membahayakan. Luas ruang yang kurang dari 9 m<sup>2</sup> per orang. Kurangnya pencahayaan (remang- remang atau gelap pada siang hari). Sirkulasi udara yang tidak baik (ventilasi kurang atau tidak ada



ventilasi). Kelembaban yang tinggi, terletak di daerah yang membahayakan secara lokasi. Tidak adanya ketersediaan air bersih, atau belum/ tidak adanya air yang memenuhi standar dan sanitasi yang buruk.

Seperti yang kita ketahui bersama Indonesia merupakan negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim. Persoalan utamanya, apakah kesejahteraan sosial yang didambakan telah terwujud di indonesia? hampir setiap hari, ada saja berita terkait dengan tindakan kekerasan dan kejahatan dengan alasan ekonomi, melacurkan diri karena ekonomi, ketidaksanggupan memenuhi kebutuhan pokok, putus sekolah karena tidak ada biaya, dan lain-lain yang menunjukkan betapa masih banyaknya masyarakat indonesia yang belum sejahtera. ironisnya, kontribusi

negara sebagai instansi yang seharusnya memiliki peran penting dalam mensejahterakan warganya, ternyata masih jauh dari harapan. berbagai masalah ekonomi, sosial dan politik di Indonesia.

Zakat berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Jumlah masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan akan menjadi berkurang jika mendapat perhatian dari pemerintah dan lembaga terkait. Zakat ialah salah satu perangkat keuangan Islam yang bertujuan untuk mensucikan harta. Salah satu zakat penghasilan yaitu zakat profesi. zakat profesi artinya zakat yang dikeluarkan dari pekerjaan atau perjuangan yang halal yaitu mendatangkan harta menggunakan cara yang simpel menggunakan mengandalkan keahlian. Contoh profesi yang mendatangkan hasil

(harta) dengan keahlian antara lain, dokter, arsitek, pejabat, advokat, pegawai BUMN, ASN (Aparatur Sipil Negara) dan lain sebagainya. Mengenai nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat tergantung pada qiyas yang digunakan.

Pembicaraan mengenai zakat profesi muncul karena kewajibanyang merupakan hasil ijtihad para ulama sekarang yang tentunya tidak terdapat ketentuan yang jelas di dalam al-Qur'an, sunnah maupun di dalam fiqih yang telah disusun oleh para ulama dahulu. Kajian islam mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern saat ini merupakan kajian yang menarik, aktual dan perlu terus dilakukan. Maka dibutuhkan adanya. peran zakat profesi dalam persoalan kehidupan bermasyarakat yang memerlukan penyesuaian dengan kondisi

modern saat ini. Siapa saja yang berhak menerima zakat ? Penerima zakat disebut mustahik. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat di sebutkan dalam Al Qur'an Surat At Taubah ayat 60.<sup>4</sup> Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa yang berhak menerima zakat (mustahik) ada 8 (delapan) golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mulaaf, riqob, gharimin, fii sabilillah dan ibnu sabil.

Adapun tujuan zakat bagi penerima (mustahik) adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka apabila melihat orang kaya yang pelit. Selain itu akan

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

muncul dalam hati mereka rasa simpatik, hormat serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.. Dan selama ini dana-dana zakat profesi sementara masih fokus dalam dimensi sosial dibandingkan dengan aspek yang lainnya seperti bantuan fakir dhuafa, bantuan bencana alam, bantuan dana pembangunan masjid, bantuan renovasi rumah dan bantuan biaya pendidikan. Juga dikarenakan keterbatasan dana yang terkumpul dari masyarakat.

Indonesia memiliki lembaga yang bertugas mengelola zakat yang dikenal dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS dibentuk oleh Undang undang No.23 tahun 2011. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang

bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat dari masyarakat kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Selain itu, BAZNAS juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat program pendistribusian dan pemberdayaan zakat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa zakat profesi merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, Dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam. Selain itu, dikarenakan potensi zakat umat islam sekarang ini cukup besar dalam jangka satu tahun saja BAZNAS Republik Indonesia bisa mengumpulkan kurang lebih 300 triliun zakat di Indonesia.

BAZNAS tersebar di propinsi dan kabupaten seluruh Indonesia, salah satunya ada di Kabupaten Ponorogo. Baznas Kabupaten Ponorogo pertama kalinya terdaftar secara resmi di tahun 2016. Pimpinan Baznas Ponorogo di lantik oleh Kepala Daerah atau Bupati Ponorogo. Baznas Ponorogo berperan penting untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan membantu memecahkan masalah sosial yang terjadi di lapangan. Termasuk permasalahan yang timbul akibat bencana alam. Salah satu misi Baznas Ponorogo yaitu memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Ponorogo melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Baznas Ponorogo mempunyai lima program utama yaitu Ponorogo Taqwa, Ponorogo

Makmur, Ponorogo Cerdas, Ponorogo Sehat dan Ponorogo Peduli. Di program ponorogo peduli inilah terdapat program bedah rumah dan plesterisasi lantai. Program bedah rumah dan plesterisasi lantai ini bertujuan untuk membuat rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Sasaran penerimanya tetap mengacu pada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Dalam pelaksanaan program penyediaan hunian layak ini dilapangan Baznas bekerjasama dengan pemerintah desa setempat dan masyarakat di lingkungan calon penerima bantuan. Sehingga dalam hal ini peneliti ingin mencoba untuk memaparkan bagaimana komunikasi, kolaborasi dan dampak dari sinergi tiga unsur pelaksana yaitu Baznas, pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan hunian layak bagi mustahik. Sehingga peneliti menulis tesis ini dengan



judul *“Sinergisitas Baznas, Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyediaan Hunian Layak Bagi Mustahik”*

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sinergisitas Baznas, pemerintah dan masyarakat kabupaten Ponorogo dalam hal komunikasi efektif dalam penyediaan hunian layak untuk mustahik?
2. Bagaimana kolaborasi yang terjadi antara Baznas, Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Ponorogo dalam penyediaan hunian layak bagi mustahik?

3. Bagaimana dampak sinergisitas Baznas, pemerintah dan masyarakat kabupaten Ponorogo dalam penyediaan hunian layak untuk mustahik?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sinergisitas Baznas, pemerintah dan masyarakat kabupaten Ponorogo dalam hal komunikasi efektif dalam penyediaan hunian layak untuk mustahik
2. Untuk mengetahui bagaimana kolaborasi antara Baznas, pemerintah dan masyarakat kabupaten Ponorogo dalam penyediaan hunian layak untuk mustahik

3. Untuk mengetahui bagaimana dampak sinergisitas antara Baznas, pemerintah dan masyarakat kabupaten Ponorogo dalam penyediaan hunian layak bagi mustahik

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dari penelitian yang akan peneliti lakukan diharapkan mempunyai manfaat di masa sekarang dan masa yang akan datang, antara lain:

##### **1. Manfaat Akademis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini juga digunakan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan menerapkan pola pikir pembelajaran yang kritis

dalam menganalisis sinergisitas Baznas, pemerintah dan masyarakat Ponorogo dalam penyediaan hunian layak huni bagi mustahik, yang nantinya akan berguna sebagai bahan untuk kajian menyusun hipotesis bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat, dalam penyediaan hunian layak huni yaitu Baznas Ponorogo, Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Masyarakat Ponorogo dan Mustahik penerima bantuan.
- b. Diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi semua yang terlibat dalam penyediaan hunian layak bagi mustahik agar dapat menemukan terobosan baru, keterlibatan pihak pihak lain yang mungkin bisa memberikan

kebermanfaatan lebih dalam mewujudkan hunian layak.

## **E. KAJIAN TERDAHULU**

Sejauh studi telaah yang Peneliti lakukan, pembahasan mengenai sinergisitas telah banyak dibahas di beberapa karya ilmiah sebelumnya. Kajian terdahulu sangat diperlukan untuk menghindari duplikasi penelitian, serta untuk membedakan dengan penelitian terdahulu. Adapun karya ilmiah yang ada hubungannya dengan tema karya ilmiah yang akan peneliti ajukan, yaitu antara lain:

1. Penelitian yang berjudul *“Corporate Social Responsibility, Program Bedah Rumah dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon*

*Progo*” ditulis oleh S.L Harjanta di tahun 2019<sup>5</sup> Berdasar album kemiskinan, angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, masih cukup tinggi. Data Tahun 2015 menyebutkan, tingkat kemiskinan mencapai di atas 20 persen atau sekitar 50 ribu penduduk. Dari puluhan ribu penduduk miskin, banyak diantaranya tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Seiring terbitnya Peraturan Daerah (Perda) nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP), maka kalangan swasta atau pengusaha memiliki tanggung jawab dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu, dalam penelitian ini akan mengkaji sejauh mana peran CSR atau keterlibatan

---

<sup>5</sup> S.l. Harjanta, “Corporate Social Responsibility, Program Bedah Rumah dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo”, Populika , Vol.7 No.2 (2019)

kalangan pengusaha dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya melalui program bedah rumah. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif kualitatif. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian kami adalah objeknya sama yaitu program penyediaan hunian layak, perbedaannya sinergi yang di munculkan di penelitian ini bersama dengan pihak swasta sedangkan penelitian kami sinergi bersama pemerintah belum dengan pihak swasta.

2. Penelitian yang berjudul “*Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten*

*Purworejo*” yang ditulis oleh Ahmad NurShobah dan Fuad Yanuar Akhmad Rifai di tahun 2020.<sup>6</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahiq di Kabupaten Purworejo, serta juga untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan usaha mikro mustahiq terhadap kesejahteraan mustahiq di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini termasuk kategori Penelitian eksplanatori atau confirmatory, yakni ingin mendapatkan penjelasan mengenai hubungan antar variabel. Objek yang akan diteliti/

---

<sup>6</sup> Ahmad Nur Shobab & Fuad Yanuar Akhmad Rifai *Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 6 No.3 (2020)



dianalisis hubungannya adalah variabel Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) produktif dengan variabel usaha mikro dan variabel kesejahteraan mustahik pada BAZNAS Kabupaten Purworejo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq di Kabupaten Purworejo, sedangkan Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq di Kabupaten Purworejo, adapun pertumbuhan usaha mikro mustahiq tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq di Kabupaten Purworejo. Potensi ZIS di Kabupaten Purworejo sebenarnya cukup besar, apabila mereka menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS

Kabupaten Purworejo akan terkumpul dana yang lebih besar bagi kemaslahatan ummat. Persamaan dengan penelitian kami adalah sama sama membahas tentang pendayagunaan Zakat, infak dan shodaqoh untuk kemaslahatan umat, tetapi perbedaannya dana zakat digunakan untuk usaha mikro, sedangkan penelitian kami dana zakat digunakan untuk bantuan penyediaan hunian layak.

3. Penelitian yang berjudul *“Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk Pemberdayaan Mustahiq pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin di BAZNAS Kabupaten Lumajang”* yang ditulis oleh Dewi Khotijah ditahun 2020.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Dewi Khotijah , *“Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk Pemberdayaan Mustahiq pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin di BAZNAS Kabupaten Lumajang”*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Muhasabatun, Vol 20. No.2 (2020)

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh di BAZNAS kabupaten Lumajang, dan untuk mengetahui pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh juga pemberdayaan mustahik pada program perbaikan rumah tangga miskin di BAZNAS kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian lapangan yaitu: Zakat dihimpun dari penerimaan zakat maal, sedangkan penyalurannya tidak lepas dengan delapan golongan (asnaf), sedangkan untuk indonesia budak tidak di ikutkan. dan penerimaan infaq tidak terkait atau lebih

leluasa dari pada zakat. Dalam perbaikan rumah tangga miskin membantu dalam memperbaiki rumah tidak layak huni, membantu kebutuhan sehari-harinya yang penghasilannya kurang. Persamaan dengan penelitian kami yaitu obyek pengerjaan adalah memperbaiki hunian yang tidak layak, namun perbedaannya tidak ada sinergi antara Baznas dengan pihak lainnya di penelitian ini

4. Penelitian yang berjudul “*Analisis Maqashid Syariah terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Dhuafa selama Pandemi Covid – 19 di Baznas Kabupaten Purwakarta*”, yang ditulis oleh Henny Prahima Kusumastuti, Nandang Ihwanudin

dan Iwan Permana ditahun 2021.<sup>8</sup> BAZNAS Kabupaten Purwakarta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dalam mengentaskan angka kemiskinan. Salah satunya yaitu program bedah rumah dhuafa ini berjalan dengan adanya dana GASIBU. Sedangkan dimasa pandemi ini sekolah diliburkan dan digantikan dengan sekolah online. Maka dari itu dana gasibu tersebut terhentikan karena adanya Penyakit (COVID-19). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana maqashid syariah dalam program bantuan bedah rumah dhuafa selama masa pandemi covid-19. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan

---

<sup>8</sup> Henny Prahima Kusumastuti, Nandang Ihwanudin dan Iwan Permana, “*Analisis Maqashid Syariah terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Dhuafa selama Pandemi Covid – 19 di Baznas Kabupaten Purwakarta, Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah*, Vol. 7. No.2, (2021)

pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dengan pihak BAZNAS. Persamaan dengan penelitian kami yaitu objeknya adalah penyediaan hunian layak, tetapi ada perbedaan yakni belum ada sinergi dengan pihak lain

5. Penelitian yang berjudul *“Analisis Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Program Bantuan Bedah Rumah Tak Layak Huni Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati”*, yang di tulis oleh Syaadah Adila Mina di tahun 2021<sup>9</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendayagunaan dana

---

<sup>9</sup> Syaadah Adila Mina, *Analisis Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Program Bantuan Bedah Rumah Tak Layak Huni Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati*, Jurnal Repository IAIN Kudus, 2021

ZIS dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah melalui program bedah rumah tak layak huni di BAZNAS Kabupaten Pati. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus atau lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi data yang menyangkut tentang program bedah rumah tak layak huni yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, program bedah rumah tak layak huni atau Pati

Peduli di BAZNAS Kabupaten Pati dimulai sejak tahun 2017 dan mengalami peningkatan jumlah penerima setiap tahunnya. Program bedah rumah tak layak huni merupakan program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Pati yang bergerak dalam bidang kemanusiaan yang disalurkan kepada fakir miskin terutama janda miskin dan juga manula yang memiliki kelemahan fisik, tidak mampu mencukupi kebutuhan pribadi, dan tidak memiliki kemampuan bekerja secara permanen. Kedua, Program bantuan bedah rumah yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Pati memiliki faktor pendukung dan penghambat. Untuk faktor pendukungnya yaitu dananya semakin meningkat dan adanya kerjasama yang baik antar pihak yang bersangkutan. Sedangkan



untuk faktor penghambat yaitu terbatasnya jumlah sumber daya manusia dan belum maksimalnya pemberian dana stimulan oleh BAZNAS Kabupaten Pati. Namun dalam mengatasi kendala tersebut BAZNAS Kabupaten Pati sudah memprogramkan akan menambah jumlah muzaki dan munfiq dan juga menambah karyawan. Persamaan dengan penelitian kami yaitu objek penelitian penelitian penyediaan hunian layak, tetapi perbedaannya tidak ada sinergi dengan pihak lainnya.

6. Penelitian yang berjudul "*Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat dan Wakaf dalam pembangunan ekonomi di Indonesia,*" yang ditulis oleh Abdul

Rahman tahun 2021.<sup>10</sup> Penelitian ini mengangkat persoalan sinergitas lembaga pengelola zakat dan wakaf di Indonesia. Sinergitas ini diperlukan untuk mengurai ketidakefektifan pengelolaan dana zakat dan wakaf di Indonesia padahal potensi dana zakat sangat besar. Banyaknya lembaga pengelola zakat dan wakaf baik dari pemerintah maupun swasta memberikan dampak positif bagi manajemen zakat dan wakaf. Namun di sisi lain, banyak juga problematika yang muncul sehingga potensi zakat dan wakaf yang besar tidak terserap dengan baik. Beberapa permasalahan yang terjadi adalah pertama adanya egoisme kelembagaan dari setiap lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia

---

<sup>10</sup> Abdur Rahman, “*Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat dan Wakaf dalam pembangunan ekonomi di Indonesia* “, Jurnal Al Kharaj Vol 1 Nomor 1, 2021

baik Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, dan Amil Zakat Tradisional dan Badan Wakaf Indonesia. Kedua lemahnya koordinasi dan komunikasi antara organisasi pengelola zakat membuat sistem data informasi menjadi lemah sehingga penentuan target zakat tidak dapat terpenuhi dengan baik. Ketiga antara pengelola zakat dan wakaf memiliki kecenderungan untuk saling bersaing dalam program – program pemberdayaan sehingga memunculkan ketidakseimbangan dalam informasi dan tingkat kepercayaan pada kalangan masyarakat. Keempat peran pemerintah menjadi mediator dan koordinator beberapa lembaga pengelola zakat dan wakaf dirasa kurang efektif karena tidak memiliki hak untuk regulator, koordinator, dan pengawas

dalam pengelolaan dana ZISWAF di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi eskriptif analitis yaitu dengan cara mengumpulkan data kemudian memaparkan apa adanya dan disusun serta dituangkan dalam bentuk narasi dan dianalisis. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa diperlukan upaya untuk mengatasi ketidakefektifan tersebut adalah dengan mensinergikan semua lembaga pengelola zakat dan wakaf dalam satu lembaga, yaitu dengan membentuk Kementerian Zakat dan Wakaf sebagai regulator, otoritator, koordinator, pengawas, dan pengelola dana ZISWAF di Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang sinergisitas, tetapi perbedaannya penelitian ini membahas sinergi

antara lembaga zakat (BAZNAS) dan lembaga wakaf, sedangkan penelitian kami membahas sinergi antara BAZNAS, pemerintah, dan masyarakat, tetapi subyek yang melakukan kerja sama ada perbedaan

7. Penelitian yang berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Oleh Baznas*”, ditulis oleh Muhtadi di tahun 2022.<sup>11</sup> Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan produk pemberdayaan masyarakat melalui program bedah rumah tidak layak huni oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Desa Seuat Kecamatan Petir

---

<sup>11</sup> Muhtadi, “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Oleh Baznas*” *Jurnal Kajian Islam dan pengembangan Masyarakat (Masyarakat Madani)*, Vol 7.No 2 (2022)

Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptik kualitatif dengan analisis menggunakan teori evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bedah rumah kampung BAZNAS dinilai dari sisi proses dan produk program telah mencapai tujuan dengan tersedianya hunian yang layak bagi mustahik, yang selanjutnya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan penerima manfaat program bedah rumah kampung BAZNAS. Adapun dari sisi input program terdapat kekurangan dari sisi pendanaan. Persamaan dengan penelitian kami yaitu objek yang diteliti penyediaan hunian layak, namun perbedaannya Baznas tidak besinergi dengan pihak lainnya.

8. Penelitian yang berjudul “*Kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan BAZNAS Kota Yogyakarta*”, yang ditulis oleh Hibnu Basuki dan R. Widodod Tri di tahun 2022.<sup>12</sup> Penelitian ini menulis tentang Kerjasama yang dibangun Pemkot Yogyakarta dengan BAZNAS merupakan modal keberhasilan pembangunan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan BAZNAS ditinjau berdasarkan empat aspek sinergi yaitu; kesamaan persepsi, koordinasi, kolaborasi dan harmoni. Sedangkan permasalahan faktor pendukung sekaligus kendala utama dalam hal ini adalah tentang kekuatan

---

<sup>12</sup> Hibnu Basuki& R. Widodo, *Kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan BAZNAS Kota Yogyakarta*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, Vol. 2 No. Special Issue 2 (2022)

hukum pengelolaan zakat di Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang diberdayakan dengan teknik triangulasi. Fokusnya adalah kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan BAZNAS. Dalam penelitian ini, penulis menentukan subjek utama diikuti dengan sumber lain dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hubungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan BAZNAS dari aspek persamaan persepsi, koordinasi, kerjasama dan keselarasan sejalan dengan langkah pembangunan daerah. Selanjutnya, dalam konteks kekuatan hukum zakat, saat ini sedang diwacanakan penyusunan peraturan daerah dengan cakupan yang lebih luas



tentang pengelolaan zakat. sejalan dengan dinamika perkembangan pembangunan daerah. Persamaan dengan penelitian kami yaitu adanya kerjasama Baznas dengan pemerintah daerah untuk penyediaan hunian layak, perbedaannya tidak ada keterlibatan masyarakat yang dibahas disini.

9. Penelitian yang ditulis oleh Firman Ardian Noor, Rahmad Hakim, Arif Luqman Hakim, yang berjudul “*Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Baznas Kota Malang Tahun 2020*”, yang ditulis tahun 2022.<sup>13</sup> Penelitian ini mengkaji tentang pendayagunaan dana zakat pada program bedah rumah yang

---

<sup>13</sup> Firman Ardian Noor, Rahman Hakim, Arif Luqman Hakim, “*Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Baznas Kota Malang Tahun 2020*”, *Journal of Islamic Economics Development and Innovation*, Vol 1 No 2 (2022)

merupakan salah satu kegiatan program kemanusiaan yang ada di BAZNAS Kota Malang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan Teori efektivitas menurut T. Hani Handoko yang menjelaskan bahwa efektivitas program bedah rumah BAZNAS Kota Malang dapat dikatakan efektif apabila sesuai dengan beberapa tolak ukur yang telah ditetapkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat pada program bedah rumah BAZNAS Kota Malang tahun 2020 sudah efektif. Persamaan dengan penelitian ini adalah pendayagunaan ZIS untuk program hunian layak, sedangkan

perbedaannya adalah belum ada sinergi dengan pihak lain.

10. Penelitian yang berjudul “*Peran Baznas dalam Mensejahterakan Masyarakat dan Meningkatkan Perekonomian Di Kota Magelang*”, yang ditulis oleh Muhammad Syaafi Muqorobin dan Endang Kartini di Tahun 2022<sup>14</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran baznas dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian di Kota Magelang serta mengetahui program dan upaya yang dilakukan oleh lembaga baznas Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui

---

<sup>14</sup> Muhammad Syaafi Muqorobin & Endang Kartini, “*Peran Baznas dalam Mensejahterakan Masyarakat dan Meningkatkan Perekonomian Di Kota Magelang*”, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol 1 No.3 (2022)

studi pustaka. kajian dari berbagai sumber informasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah baznas cukup berperan dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian di Kota Magelang karena adanya bantuan dari baznas yang dapat dijadikan sebagai modal usaha untuk. Persamaan dengan penelitian kami adalah pendayagunaan ZIS untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi perbedaannya dana ZIS di penelitian ini digunakan untuk bantuan modal usaha, sedangkan pada penelitian kami digunakan untuk penyediaan hunian layak.

11. Penelitian yang berjudul *“Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat di Baznas Kabupaten*

*Siak*”, ditulis oleh Azwar di tahun 2022<sup>15</sup> Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Siak. Hal ini penting dikaji karena pengelolaan zakat yang baik akan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Siak secara kreatif mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat dalam berbagai program seperti Siak Sejahtera, Siak Cerdas, Siak Dakwah, Siak Peduli, dan Siak

---

<sup>15</sup> Azwar, “Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat di Baznas Kabupaten Siak”, Jurnal Kajian Manajemen Dakwah, Vol.4 No.1(2022)

Sehat. Program-program ini dikelola secara professional dan terorganisir dari tingkat kecamatan melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sampai tingkat kabupaten melalui Baznas, sehingga mendorong masyarakat Muslim untuk membayar zakat mereka. Kemudian semua aktivitas pengelolaan zakatnya terinput ke dalam Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA). Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan efektivitas pengelolaan dana zakat di Baznas Kabupaten Siak. Perbedaan penelitian ini dengan yang kami teliti adalah bahasan tentang manajemen pengelolaan ZIF, sedangkan kami membahas tentang sinergi. Persamaan nya yang dibahas masih seputar Baznas.

12. Penelitian yang berjudul “*Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dengan Program Bedah Rumah di Kota Jambi*”, yang ditulis oleh Jevi Saputra di tahun 2022<sup>16</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui berbagai cara yang terus menerus digunakan untuk mengurangi kemiskinan, salah satunya adalah pemberian berbagai bantuan sosial kepada masyarakat melalui program renovasi rumah. Program renovasi rumah adalah sebuah kegiatan. dilakukan dalam konteks. Program bedah rumah merenovasi rumah tidak layak huni, yaitu bangunan tempat tinggal yang tidak memenuhi

---

<sup>16</sup> Jevi Saputra, “*Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dengan Program Bedah Rumah di Kota Jambi*”, *Journal of Sharia Economic Research*, Vol.6 No 2(2022)

persyaratan sanitasi, keamanan, dan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) kesejahteraan masyarakat setelah menerima bantuan perbaikan rumah. 2) Program bedah rumah berdampak pada pengentasan kemiskinan di kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Data yang digunakan adalah data primer dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Responden yang diwawancarai diwawancarai dengan menggunakan metode purposeful sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) renovasi rumah mengurangi jumlah orang miskin, (2) renovasi rumah efektif



meningkatkan kekayaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian kami adalah objek bahasannya adalah penyediaan hunian layak, tetapi berbeda lokasi penelitian dan sinergisitas Baznas dengan pihak lain.

13. Penelitian yang berjudul “*Dynamuc Governance Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni*” yang ditulis oleh Ardi Rodhita Setiawan dan Ertien Rining Nawangsari di tahun 2023.<sup>17</sup> Rumah tidak layak huni saat ini menjadi salah satu masalah kemiskinan sehingga membutuhkan peningkatan kualitas untuk menjadi rumah layak huni. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial dalam pemenuhan rumah layak huni

---

<sup>17</sup> Ardi Radhita Setiawan & Ertien Rining Nawangsari, *Dynamic Governance Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni*. Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 14, No.1 (2023)

menjalankan program rehabilitasi sosial Rutilahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program Rutilahu dalam perspektif dynamic governance melalui komponen kapabilitas dinamis di Dinas Sosial Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Surabaya mengembangkan program Rutilahu dengan membuat inovasi e-Rutilahu dan mengintegrasikan dengan Padat Karya serta bekerjasama dengan perusahaan CSR, para pengembang, Baznas Kota

Surabaya. Akan tetapi, dalam praktiknya di lapangan, proses administrasi pada program Rutilahu masih dinilai rumit dibandingkan program rehabilitasi sosial milik swasta sehingga pelayanan administrasi perlu disederhanakan agar efektif. Selain itu, kendala-kendala mendasar dan kendala teknis seharusnya dapat menjadi bahan evaluasi yang dapat dipertimbangkan agar pelayanan program Rutilahu dapat lebih tepat sasaran dan maksimal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian kami adalah dana zakat digunakan untuk penyediaan hunian layak, akan tetapi perbedaannya di penelitian ini kerja sama dengan pihak lain cenderung ke swasta.

## **F. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian lapangan (Field Research), yaitu dengan memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>18</sup> Field research yang dilakukan dalam penelitian kualitatif menghasilkan data yang diartikan sebagai fakta atau informasi dari faktor (subjek penelitian, informasi, pelaku), aktivitas, dan tempat yang

---

<sup>18</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humaika, 2014)

menjadi subjek penelitiannya. Pada penelitian ini peneliti fokus pada data yang di peroleh dari Baznas Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Desa dan Masyarakat Ponorogo yang terlibat.

### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitiannya ialah penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>19</sup> Sedang definisi yang lain menyebutkan penelitian kualitatif dipilih dengan harapan dapat menghasilkam data deskriptif sehingga

---

<sup>19</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018)

nantinya dapat dipahami oleh masyarakat umum.<sup>20</sup> Peneliti akan meneliti secara langsung kepada Baznas sebagai lembaga zakat yang bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat Ponorogo. Peneliti akan mengamati sinergisitas Baznas, Pemerintah dan Masyarakat Ponorogo dalam hal komunikasi efektif, umpan balik cepat dan kretivitas dalam menyediakan Hunian Layak bagi Mustahik.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Baznas Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Trunojoyo No 143, Kelurahan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih Baznas

---

<sup>20</sup> Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995)

Ponorogo karena adanya keterkaitan antara penelitian dengan permasalahan yang akan diteliti. Baznas Ponorogo merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam program sinergi ini. Terdapat fenomena atau gejala sosial yang timbul pada masyarakat Ponorogo akibat sinergisitas ini. Penyediaan hunian layak ramai di perbincangkan di tengah masyarakat karena sangat jelas dalam pelaksanaan melibatkan pemerintah dan masyarakat setempat. <sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. (Yogyakarta: Erlangga, 2009)

### **3. Data Penelitian dan Sumber Data**

#### **a. Data Penelitian Primer**

Data merupakan bahan keterangan tentang suatu objek penelitian.<sup>22</sup> Data pada penelitian ini di peroleh melalui proses wawancara langsung kepada pihak pihak yang terlibat, diantaranya pimpinan Baznas Kabupaten Ponorogo, Kepala Pelaksana Baznas Ponorogo, Staf pendistribusian Baznas Kabupaten Ponorogo, Lurah, Kamituwo dan beberapa orang mustahik penerima program. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh data langsung dari pihak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Data

---

<sup>22</sup> H. M. Burhan Bungin, , *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)



primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau mengumpulkan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>23</sup>

### **b. Data Penelitian Sekunder**

Data sekunder berasal dari dokumen tertulis yang ada di lokasi penelitian dan juga informasi dari sumber pustaka buku, e book atau lainnya yang ada kaitannya dengan judul yang di teliti. Berikutnya data sekunder juga berasal dari dokumentasi pelaksanaan di lapangan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Untuk menyusun penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dilapangan yang berkaitan dengan:

- 1) Data tentang bagaimana sinergisitas Baznas, pemerintah dan masyarakat Ponorogo dalam hal komunikasi efektif dalam penyediaan hunian layak bagi mustahik
- 2) Data tentang bagaimana sinergisitas Baznas, pemerintah dan masyarakat kabupaten Ponorogo dalam hal umpan balik cepat dalam penyediaan hunian layak untuk mustahik
- 3) Data tentang bagaimana sinergisitas Baznas, Pemerintah dan masyarakat Ponorogo

dalam hal kreativitas dalam penyediaan hunian layak bagi mustahik

### **c. Sumber Data**

Sumber data ialah subjek dari mana data dapat diperoleh baik dari literatur yang membahas tentang sinergitas Baznas, Pemerintah dan masyarakat serta melakukan wawancara secara langsung kepada pimpinan dan pelaksana Baznas Ponorogo, juga ada lurah, perangkat desa dan masyarakat yang terlibat dalam menyediakan penyediaan hunian layak bagi mustahik. Sumber data adalah informan yang memberi informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Asvin Abdurrahman (Waka II Baznas Ponorogo)
- 2) Diana (Waka IV Baznas Ponorogo)
- 3) Sukarni (Kepala Pelaksana, Baznas Ponorogo)
- 4) Nur Arifin (Staf Pelaksana Baznas Ponorogo)
- 5) Edi (Kamituwo Desa Ngunut)
- 6) Joko Susetyo (Lurah Banyudono)
- 7) Nyamirah (Penerima Program)
- 8) Andi (Penerima Program)

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian.

### **a. Wawancara**

Peneliti menggunakan metode wawancara sebanyak maksimal 2 kali. Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan wawancara mendalam yaitu teknik wawancara dengan peneliti terlibat secara langsung secara mendalam dan dilakukan tanpa menggunakan pedoman. Peneliti mewawancarai pimpinan dan

---

<sup>25</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018)

pelaksana Baznas, pemerintah dan masyarakat yang terlibat dalam penyediaan hunian layak bagi mustahik. Wawancara ini bertujuan untuk menggali data yang akurat dan tepat terkait dengan komunikasi yang efektif, kolaborasi dan sinergitas Baznas, Pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan hunian layak bagi mustahik.

#### **b. Observasi**

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Termasuk yang paling penting adalah proses observasi dan memori.<sup>26</sup> Dalam hal ini pengamat melihat secara visual,

---

<sup>26</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

sebanyak lebih dari kali sehingga keabsahan data sangat bergantung pada keterampilan pengamat.

### **c. Dokumentasi**

Catatan dokumentasi bisa dikumpulkan sebagai data penelitian. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari dokumen sebagai data pendukung dan sebagai data pelengkap yang diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam.<sup>27</sup> Metode dokumentasi yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan sinergisitas Baznas, pemerintah dan masyarakat Ponorogo dalam hal komunikasi efektif,

---

<sup>27</sup> Ibid.

kolaborasi dan dampak sinergisitas antara Baznas, pemerintah dan masyarakat Ponorogo dalam penyediaan hunian layak bagi mustahik.

## **5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang diteliti untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh peneliti.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berbagai metode, dan berbagai waktu. Oleh karenanya terdapat

---

<sup>28</sup> A. Muri Yusuf, , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)



teknik pengujian keabsahan data melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.

#### **a. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh kepada beberapa sumber. Hal ini dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sampai pada kesimpulan, setelah itu diperlukan kesepakatan (pembahasan keanggotaan) dengan tiga sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan cek data kepada Baznas, pemerintah dan masyarakat yang terlibat. Peneliti akan melakukan wawancara untuk memastikan

keabsahan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.

### **b. Triangulasi Waktu**

Pengumpulan data dengan teknik wawancara pagi sampai sore menyesuaikan waktu dari informan, karena informan baru, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih reliabel. Selain itu dapat dilakukan dengan meneliti wawancara, observasi atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil pengujian menghasilkan data yang berbeda, pengujian diulangi untuk mengetahui keakuratan data.

Dalam Penelitian ini, triangulasi waktu yang dilakukan peneliti adalah melakukan

wawancara di waktu yang berbeda namun pada kondisi yang sama, yaitu saat pelaksanaan kegiatan penyediaan hunian layak bagi mustahik. Peneliti juga melakukan wawancara di luar kegiatan kepada informan.<sup>29</sup> Wawancara yang dilakukan bukan wawancara terstruktur, misal berbincang melalui telepon atau saat bertemu di kegiatan lain. Peneliti menggunakan metode triangulasi ini bertujuan untuk memperkuat data yang diperoleh pada objek penelitian.

## **6. Teknik Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan dari lapangan kemudian diolah dengan teknik analisis

---

<sup>29</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018)

deskriptif kualitatif. Proses pengolahannya melalui tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi yang diperoleh dari Baznas Ponorogo. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Reduksi data**

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan dan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan peneliti secara berkesinambungan berkala sejak awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data. Peneliti kemudian melakukan reduksi data yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan hunian

layak dan dampak yang dapat ditimbulkan dari tersedianya hunian layak tersebut.

### **b. Penyajian data**

Penyajian data adalah peneliti mengumpulkan sejumlah data dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data, maka selanjutnya adalah menyajikan ke dalam inti pembahasan yang dijabarkan dari hasil penelitian lapangan. Data yang sudah diperoleh selanjutnya akan diperinci tingkat validitasnya dan selanjutnya akan dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan pada Baznas, pemerintah dan masyarakat yang terlibat dalam penyediaan hunian layak bagi mustahik

### c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah merumuskan kesimpulan dari data yang sudah di reduksi dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan pola induktif, yakni kesimpulan umum yang ditarik dari pernyataan yang bersifat khusus.<sup>30</sup> Dalam hal ini peneliti mengkaji sejumlah data spesifik mengenai masalah yang menjadi objek penelitian, kemudian membuat kesimpulan secara umum. Peneliti juga menggunakan pola induktif, yakni dengan cara menganalisis data yang bersifat khusus kemudian mengarah kepada kesimpulan yang

---

<sup>30</sup> Muhammad Arif Tito, *Masalah Dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan.*, Makassar: Andira Publisher, 2005)

bersifat lebih umum, kemudian peneliti menyusunnya dalam kerangka tulisan yang utuh.

## **7. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode induktif.

Analisis data induktif yaitu analisis atas data dari yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu

berupa data-data di lapangan yang berasal dari Baznas, pemerintah dan masyarakat yang terlibat dalam penyediaan hunian layak bagi mustahik.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun kerangka dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang penjelasan dan gambaran secara umum tentang penelitian yang dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu,



Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II TEORI SINERGISITAS**

Bab ini berisi teori dan penjelasan tentang teori sinergisitas, dan kolaborasi

## **BAB III GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penjelasan tentang Baznas Ponorogo, data pengumpulan ZIS Baznas Ponorogo. didalamnya terdapat paparan data program penyediaan hunian layak dari lapangan

**BAB IV            SINERGISITAS BAZNAS,  
PEMERINTAH DAN  
MASYARAKAT DALAM HAL  
KOMUNIKASI EFEKTIF**

Bab ini berisi tentang data dan analisis komunikasi yang efektif yang terjadi dalam sinergisitas Baznas, pemerintah dan masyarakat Ponorogo dalam penyediaan hunian layak bagi mustahik.

**BAB V            KOLABORASI BAZNAS,  
PEMERINTAH DAN MASYARAKAT**

Bab ini berisi tentang data dan analisis kolaborasi yang terjadi antara Baznas, pemerintah dan masyarakat Ponorogo

dalam penyediaan hunian layak bagi mustahik.

## **BAB VI DAMPAK SINERGISITAS BAZNAS, PEMERINTAH DAN MASYARAKAT**

Bab ini berisi tentang data dan analisis dampak sinergisitas antara Baznas, pemerintah dan masyarakat Ponorogo dalam penyediaan hunian layak bagi mustahik.

## **BAB VII KESIMPULAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari setiap rumusan masalah, saran dan kata penutup yang juga dilengkapi dengan Daftar Pustaka.

## BAB II

### TEORI SINERGISITAS

#### A. KONSEP TEORI SINERGISITAS

Sinergi berkaitan dengan konsep dasar manajemen, karena konsep dasar manajemen adalah universal didefinisikan menggunakan kerangka ilmiah, termasuk aturan dan prinsipnya.<sup>1</sup> Sinergi adalah sebuah proses dimana kolaborasi dapat menghasilkan kuantitas dan kualitas aktivitas yang lebih tinggi, bahkan dengan lebih banyak kreativitas, dibandingkan ketika bekerja sendiri<sup>2</sup> Dalam Kamus

---

<sup>1</sup> Herujito, Yayat M, *Dasar-Dasar Manajemen*. ( Jakarta : Grasindo, 2001)

<sup>2</sup> Saunders, P. *Insect Clock Third Edition*. Amsterdam: Elsevier Science(2002)

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sinergi dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau aksi bersama. Sinergi dibangun dan ditegaskan kemitraan yang sukses dan kemungkinan kemitraan menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan untuk dapat menciptakan karya yang berkualitas .<sup>3</sup>

Sinergitas bisa dibangun dari cara berkomunikasi serta koordinasi.dengan penjelasan diantaranya:

## **1. Komunikasi**

Komunikasi ialah sebuah tindakan penjelasan informasi antar pihak ke pihak lainnya.<sup>4</sup> Komunikasi dapat diartikan sebagai

---

<sup>3</sup> <http://kbbi.web.id/sinergi/>/Diakses Tanggal 2 Mei 2024, jam 15.57

<sup>4</sup> Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*. (Surabaya: Medika Utama, 2005)

kegiatan seseorang yang dilakukan untuk menginterpretasikan sebuah pandangan baru. Sedangkan menurut Sofyandi serta Garniwa komunikasi bisa dijabarkan menjadi dua bagian, yaitu :<sup>5</sup>

- a. Komunikasi berorientasi yang dilakukan terhadap seseorang yang akan melaksanakan kegiatannya.<sup>6</sup>
- b. Komunikasi berorientasi pada penerima yang menangani semua aktivitas Menurut Harold D. Lasswell, cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi adalah adanya

---

<sup>5</sup> Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Insani*. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015)

<sup>6</sup> Sofyandi, *Macam-Macam Komunikasi Organisasi*. (Jakarta: Pustaka Setia, 2003)

lima unsur komunikasi yang saling bergantung satu dengan lainnya.<sup>7</sup> yakni :

1) Sumber (Source)

Dalam setiap peristiwa komunikasi, sumber terlibat sebagai pencipta atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antar manusia, suatu sumber dapat terdiri dari satu orang atau dapat berbentuk kelompok. Sumber sering disebut transmitter atau pengirim, communicator, atau dalam bahasa Inggris source, sender, atau encoder.

---

<sup>7</sup> Deddy Mulyana. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), 69

Karena kesamaan makna dalam proses komunikasi sebenarnya bergantung pada komunikator, maka ada syarat-syarat yang diperlukan komunikator/ sumber antara lain: <sup>8</sup>

- a) Kepercayaan yang tinggi terhadap komunikator
- b) Keterampilan komunikasi
- c) Memiliki pengetahuan yang luas
- d) Sikap.
- e) Daya tarik dalam arti kemampuannya mengubah sikap dan pengetahuan komunikator

---

<sup>8</sup> Effendi, *Kepemimpinan dan Komunikasi*, (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996) h. 59



## 2) Pesan (Message)

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah apa yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan secara langsung atau melalui proses media komunikasi<sup>9</sup>

Pesan ini mungkin bersifat verbal atau non-verbal. Pesan lisan dapat berbentuk surat, buku, majalah, memo, dan lain-lain. Pesan lisan dapat berupa percakapan pribadi, percakapan telepon, radio, dan lain-lain. Pesan nonverbal dapat berupa gerak tubuh,

---

<sup>9</sup> Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), 23.

gerakan tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan lain-lain. Pesan datang dalam berbagai format:

a) Informasional, yaitu pemberian informasi agar komunikator dapat mengambil kesimpulan sendiri.

b) Persuasi adalah terbangunnya pemahaman dan pengakuan dalam diri seseorang bahwa apa yang kita komunikasikan menimbulkan suatu bentuk pendapat atau sikap yang akan membawa perubahan, namun perubahan itu atas kemauannya sendiri.

c) Koersif, yaitu penerapan sanksi. Format dikenal sebagai agitasi.

artinya, menyangkut desakan-desakan yang menimbulkan tekanan internal antara satu sama lain maupun di ruang publik.<sup>10</sup>

Ketiga bentuk pesan ini biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang pimpinan ke bawahan, informasi harus dipahami oleh bawahannya

### 3) Media (Channel)

Media yang dimaksud disini adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber

---

<sup>10</sup> H.A.W Widjaya, *Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997)

kepada penerima. Ada opini di saluran atau media. Beberapa orang percaya bahwa media dapat mempunyai berbagai bentuk. Misalnya dalam komunikasi interpersonal, panca indera dianggap sebagai media komunikasi. Dalam komunikasi massa, media merupakan alat yang dapat menghubungkan sumber dan penerima secara terbuka sehingga semua orang dapat melihat, membaca, dan mendengar.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), 24

#### 4) Penerima (Receiver)

Penerima adalah orang yang menerima pesan dari pengirim. Penerima dapat terdiri dari satu orang atau lebih dari orang, dan dapat juga berbentuk kelompok atau kolektif. Penerima pesan merupakan unsur penting dalam proses komunikasi karena merupakan sasaran komunikasi.

Ketika sebuah pesan tidak diterima oleh penerima, berbagai jenis masalah terjadi dan seringkali

memerlukan perubahan pada sumber, pesan, atau saluran<sup>12</sup>

Komunikasi yang efektif harus didukung dan dikomunikasikan oleh seorang komunikator. Komunikator harus mampu mendengar dan memahami pesan yang disampaikan. Begitu pula komunikator harus mampu menyampaikan pesan yang tepat.

#### 5) Pengaruh (*Effect*)

Pengaruh atau akibat adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan,

---

<sup>12</sup> Ibid, h. 25

dirasakan, dan dilakukan penerima sebelum dan sesudah menerima pesan.

Pengaruh ini dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, pengaruh juga dapat diartikan sebagai perubahan atau peningkatan keyakinan terhadap pengetahuan, sikap, atau perilaku seseorang sebagai akibat dari penerimaan suatu pesan<sup>13</sup>

Dampak yang ditimbulkan dapat diklasifikasikan menurut besaran kadarnya yakni:

---

<sup>13</sup> Ibid , h.26

a) Efek kognitif adalah efek yang ditimbulkan oleh komunikasi yang mengakibatkan perolehan pengetahuan atau peningkatan kecerdasan.

b) Efek efektif. Yaitu suatu efek yang tingkatnya lebih tinggi daripada efek yang diketahui komunikator tetapi mengharukan dan menghasilkan emosi tertentu, seperti kasihan, haru, sedih, gembira, atau marah.

c) Pengaruh perilaku (positif), pada tingkat yang paling tinggi, yaitu yang tampak terjadi pada diri



kommunikasikan dalam bentuk suatu perbuatan, perbuatan, atau kegiatan.

## 6) Jenis Komunikasi

Adapun jenis komunikasi ada beberapa, antara lain:

a) Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan secara tertulis. Kelebihan komunikasi ini antara lain komunikasi telah dipersiapkan dengan baik sebelumnya.

b) Komunikasi lisan adalah komunikasi yang berlangsung secara lisan. Komunikasi ini dapat

dilakukan secara langsung atau melalui telepon.

c) Komunikasi non verbal adalah komunikasi yang menggunakan ekspresi wajah, pantonomim, dan bahasa isyarat.

d) Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang bersifat memaksa, dapat berupa perintah atau instruksi, dan bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi.

## **2. Komunikasi Eksternal**

Menurut Onong U. Effendy, komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan audiens di luar

organisasi.<sup>14</sup> Di sisi lain Suranto AW memberikan pengertian bahwa komunikasi eksternal merupakan proses komunikasi antara organisasi dengan pihak eksternal organisasi. Sebagaimana diketahui, keberadaan suatu organisasi tentunya memerlukan dukungan, partisipasi, kepercayaan dan kerjasama lingkungan hidup baik dari organisasi lain maupun masyarakat umum.

Komunikasi organisasi eksternal mengacu pada komunikasi antara pemimpin organisasi dan kelompok sasaran di luar organisasi. Dalam organisasi besar, komunikasi ini dilakukan oleh manajer hubungan

---

<sup>14</sup> Onong Uchajana Effendy, *Ilmu Komunikasi : Teori Dan Praktek*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005) h. 126

masyarakat dan bukan oleh pimpinan itu sendiri.<sup>15</sup> Seorang pimpinan hanya dapat melakukan apa yang dianggapnya sangat penting. Komunikasi Eksternal terdiri dari saluran dua arah, yaitu :<sup>16</sup>

- a. Komunikasi dari organisasi kepada masyarakat.

Komunikasi ini biasanya dilakukan dengan cara yang informatif dan membuat audiens merasa dilibatkan, atau setidaknya merasa ada hubungan internal. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk jurnal,

---

<sup>15</sup> Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 26

<sup>16</sup> Ngalimun, *Strategi Dan Model Pembelajaran*.(Yogyakarta;Aswaja Pressindo, 2016) h.89

siaran pers, artikel surat kabar dan majalah, pembicaraan di radio, dokumenter, brosur, selebaran, poster, dan konferensi pers.

b. Komunikasi dari masyarakat kepada organisasi.

Komunikasi antara audiens dan organisasi merupakan umpan balik sebagai dampak dari aktivitas dan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Organisasi pada dasarnya adalah sistem terbuka yang terdiri dari bagian-bagian kompleks yang saling berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan atau kondisi fisik tertentu,

teknologi, dan segala sesuatu yang ada dalam lingkungan sosial.

Organisasi adalah sistem, dan setiap sistem mengekstrak sumber daya dari lingkungan, memprosesnya, dan mengeluarkan hasilnya ke lingkungan. Organisasi melakukan sesuatu untuk mengolah sumber daya dan menghasilkan hasil yang membantu mencapai tujuan organisasi.<sup>17</sup>

Pada tahun 1938, Chester I. Barnard menyatakan perlunya menciptakan sistem komunikasi sebagai

---

<sup>17</sup> Skripsi R Habsari Dian Rini, 'Pelaksanaan Komunikasi Eksternal Dalam Meningkatkan Jumlah Peserta Didik Baru Di SMK Muhammadiyah 1 Tempel.' diakses pada tanggal 30 April 2024

tugas pertama dan terpenting yang diselesaikan seorang pemimpin. Setelah itu, perlu juga ditetapkan tujuan dan penciptaan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mengapa demikian? Dalam sebuah organisasi, Anda dapat melihat bahwa seluruh aktivitas organisasi dimulai dengan lalu lintas komunikasi. Proses penetapan tujuan, penetapan tugas, dan pelaporan dilakukan melalui komunikasi. Komunikasi membantu mengendalikan perilaku anggota organisasi dalam berbagai cara. Setidaknya dalam organisasi, komunikasi memiliki empat fungsi utama: kontrol,

informasi, motivasi, dan komunikasi emosional.<sup>18</sup> Di sisi lain Suranto AW memberikan pengertian bahwa komunikasi eksternal merupakan proses komunikasi antara organisasi dengan pihak eksternal organisasi. Sebagaimana diketahui, keberadaan suatu organisasi tentunya memerlukan dukungan, partisipasi, kepercayaan dan kerjasama lingkungan hidup baik dari organisasi lain maupun masyarakat umum.

Komunikasi organisasi eksternal mengacu pada komunikasi antara pemimpin organisasi dan kelompok

---

<sup>18</sup> Onong Uchajana Effendy, *Ilmu Komunikasi : Teori Dan Praktek*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005) h. 128



sasaran di luar organisasi. Dalam organisasi besar, komunikasi ini dilakukan oleh manajer hubungan masyarakat dan bukan oleh pimpinan itu sendiri<sup>19</sup> Seorang pimpinan hanya dapat melakukan apa yang dianggapnya sangat penting.<sup>20</sup>

### **3. Pola Komunikasi Eksternal**

**Suranto** AW menjelaskan dalam bukunya bahwa pola komunikasi eksternal tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain: <sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid 129

<sup>20</sup> Suranto, AW, *Komunikasi Interpersonal*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)h 63

<sup>21</sup> Ibid, h.64

a. Komunikasi eksternal antar kantor dengan konsumen atau pelanggan, bertujuan:

- 1) Untuk mengetahui reaksi konsumen terhadap kualitas pelayanan
- 2) Untuk mengetahui harapan konsumen atau pengguna jasa terhadap produk dan jasa
- 3) Pemberitahuan adanya produk baru
- 4) Pemberitahuan perubahan harga
- 5) Pemberitahuan jumlah konsumen dan kenaikannya
- 6) Untuk mengetahui kritik pelanggan atau harapan pelanggan

Saat melakukan komunikasi eksternal ini, organisasi berupaya memberikan

informasi yang dibutuhkan dari pihak eksternal. Arni Muhammad menjelaskan:

b. Komunikasi eksternal antara perusahaan dan pemegang saham, bertujuan:<sup>22</sup>

- 1) Menerima informasi dan saran dari pemegang saham
- 2) Mengirim laporan
- 3) Menerima tanggapan atas kemajuan Kantor
- 4) Menginformasikan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

c. Komunikasi eksternal antara lembaga dengan masyarakat umum, bertujuan untuk membangun hubungan yang

---

<sup>22</sup> Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h 198-199

harmonis dengan masyarakat setempat khususnya lingkungan sekitar. Oleh karena itu, komunikasi ini diharapkan dapat mengurangi konflik dengan lingkungan sosial. Proses komunikasi dengan masyarakat (khususnya masyarakat/organisasi/perusahaan sekitar) dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

- 1) mengadakan acara silaturahmi bergantian;
- 2) mengundang masyarakat ke acara tertentu;
- 3) secara terbuka mendukung kegiatan yang berpartisipasi dalam atau menyediakan kegiatan dimasyarakat .

d. Komunikasi eksternal lembaga untuk memelihara hubungan baik dengan pemerintah , bentuknya antara lain:

- 1) Pengurusan izin atau izin usaha
- 2) Pembayaran pajak
- 3) Meminta bantuan administrasi
- 4) permintaan bantuan hukum;

e. Komunikasi eksternal antara lembaga dengan pers atau media dengan tujuan menjalin kerja sama dan menggunakan media berita sebagai sarana penyebaran informasi dan sebagai media periklanan; Komunikasi dengan pers dapat dilakukan , diantaranya:

- 1) Mengadakan konferensi pers
- 2) Mengeluarkan pernyataan pers (press release)
- 3) Memasang iklan
- 4) Kegiatan publik melalui suara hati pembaca

Komunikasi eksternal dalam hal ini adalah suatu organisasi upaya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak luar organisasi/lembaga. Alni Muhammad mengatakan pemberian informasi kepada masyarakat memiliki banyak tujuan, antara lain untuk mengubah sikap (persepsi) masyarakat terhadap organisasi/lembaga, seperti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi/lembaga. Sehingga

otomatis kepercayaan publik akan meningkat juga.<sup>23</sup>

#### **4. Tujuan pelaksanaan komunikasi eksternal**

Tujuan umum komunikasi eksternal terutama adalah untuk menyampaikan informasi tentang suatu organisasi atau lembaga, seperti kegiatan dan hasil-hasilnya, kepada banyak orang. Kualitas produk yang diperoleh, layanan organisasi/ lembaga, dan peralatan yang tersedia, apa manfaatnya, dll.

---

<sup>23</sup> Muhammad Arni, *Komunikasi Organisasi*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h 198-199

Lebih lanjut, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan pihak-pihak di luar organisasi, seperti pengguna jasa organisasi, pemangku kepentingan lainnya, dan masyarakat umum. Tujuan-tujuan ini saling berkaitan dan sulit dipisahkan. Dalam beberapa kasus, presentasi komunikasi eksternal dibuat dengan tujuan tertentu, namun tujuan lain juga dapat dicapai.<sup>24</sup> dalam kerangka komunikasi yang melibatkan antar perorangan.

## **5. Koordinasi**

Adanya sinergi dari seorang pegawai pastilah terdapat adanya koordinasi

---

<sup>24</sup> Ibid



antar pegawai. Komunikasi hanya dapat dikoordinasikan antar pegawai yang dinyatakan oleh Hasan bahwa pada komunikasi diharapkan ada koordinasi.<sup>25</sup> Koordinasi dapat diartikan sebagai sebuah integrasi dari aktivitas individu maupun kelompok menuju ke arah tujuan bersama. terdapat 5 syarat agar terwujudnya yang kompak yaitu :

- a. Hubungan langsung, bahwasanya hubungan langsung dari koordinasi yang dilakukan antar pegawai.
- b. Kesempatan awal, sebelum ke tahap perencanaan pastilah diperlukan dengan

---

<sup>25</sup> Triana Rahmayati dkk, 'Sinergitas Stakeholder Dalam Inovasi Daerah'. Jurnal Administrasi Publik (JAP) 2, no.4, 643. Diakses pada tanggal 2 Mei 2024.

adanya kesempatan awal untuk saling koordinasi.

- c. Kontinuitas, proses yang dilakukan secara di setiap waktu pada saat tahap perencanaan.
- d. Dinamisme, koordinasi dapat dilakukan secara terus-menerus yang dapat dijadikan sebagai perubahan dari lingkungan intern maupun ekstern.
- e. Tujuan yang jelas, tujuan jelas merupakan bagian penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Wiratno, *Teori Koordinasi Dan Praktek*. Praktek (Jakarta: Gramedia Group, 2004)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sinergitas adalah suatu aktivitas yang dijalankan secara bersama untuk menerima hasil maksimal yang dihubungkan ke beberapa kiprah krusial di dalamnya. Sinergitas bisa dibangun melalui komunikasi dan koordinasi.

Tujuan dari sinergi adalah untuk mempengaruhi perilaku individu berkomunikasi dengan grup, melalui dialog dengan semua orang kelompok, pandangan, sikap dan pendapat mereka mengenai kesuksesan. <sup>27</sup>Sinergi juga saling melengkapi dan dilengkapi untuk mendapatkan sebuah

---

<sup>27</sup> Akbar pandu Dwi Nugraha, 'Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa'. PUBLISIA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara 2, no. 1 (2017)

tercapainya tujuan per bagian. Konsep kerja sama tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada hal yang positif
- b. Sebagai alternatif dari paradigma pelengkap
- c. Saling bekerja sama untuk mencapai tujuan.
- d. Mendapatkan hasil yang maksimal.

Berkat sinergi, ada kerjasama model (pikiran) lain akan membuahkan hasil lebih besar dan lebih efisien, karena proses ini dicapai menunjukkan tujuan dan kesepakatan bersama untuk meraih hasil yang positif. Sinergi berarti saling menghormati ide-ide dan pendapat yang berbeda serta bersedia berbagi. Bersinergi artinya tidak egois melainkan saling

mendukung.<sup>28</sup> Sinergi bertujuan menggabungkan bagian-bagian yang dimiliki perbedaan dalam tujuan bersama. Indikator sinergitas menurut Doctoroff merupakan indikator yang di pakai untuk menganalisis sinergi, yang menjadi syarat utama dari sistem sinergi yang ideal, antara lain:<sup>29</sup>

**a) Komunikasi Efektif**

Komunikasi yang efektif dapat menciptakan perubahan perilaku manusia yang terlihat pada saat proses penyampaiannya. Padahal, tujuan dari

---

<sup>28</sup> Ardana, I Komang dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta : Graha Ilmu, 2012)

<sup>29</sup> Jovi Andre Kurniawan dan Retno Surayawati, ‘, Sinergitas Antar Stakeholder Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Di Kota Temanggung’. *Jurnal Wacana Publik* 1, no 1, 2017, 41. Diakses Pada Tanggal 2 Mei 2024

komunikasi yang efektif adalah agar informasi dapat terkomunikasikan secara lengkap antara pemberi informasi dan penerima informasi dengan bahasa yang jelas sehingga mudah dipahami.<sup>30</sup>

Komunikasi yang lebih efektif dimungkinkan ketika komunikator berbagi kesamaan dalam pemahaman, perilaku, dan bahasa. Suatu komunikasi dianggap efektif jika:<sup>31</sup>

- 1) Pesan telah diterima dan dapat dipahami sebagaimana dimaksud untuk disampaikan.

---

<sup>30</sup> Ardi Santoso, *Pengaplikasian Komunikasi Yang Efektif Di Perusahaan*. (Yogyakarta: Kertasono Press, 2011)

<sup>31</sup> Hardjana, A. M. *Komunikasi Intrapersonal dan Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Kanisius. (2003).

- 2) Karena penerima dapat mengenali informasi yang dikirimkan oleh pengirim, maka informasi yang dikirimkan dapat dengan mudah dipahami. Sehingga ada tindakan sukarela oleh penerima pesan. Komunikator dengan sukarela melacak pesan yang diterimanya dan tidak dipaksa melakukannya.
- 3) Tidak ada hambatan, komunikasi yang efektif diukur dari lancar tidaknya komunikasi dan tanpa hambatan.
- 4) Kualitas hubungan interpersonal dapat ditingkatkan. Komunikasi yang efektif cenderung membina hubungan positif antar pihak yang

berkomunikasi. Hal ini dikarenakan komunikator merasa mendapat manfaat dari komunikasi tersebut dan merasa perlu untuk menjaga hubungan.

**b) Umpan Balik Yang Cepat**

Umpan Balik Cepat adalah jawaban atas pertanyaan yang diajukan penanya kepada narator.<sup>32</sup> Atau suatu tanggapan dari penerima pesan kepada pengirim terhadap informasi yang dikirimkan kepada seseorang mengenai hasil suatu proses komunikasi untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Menurut Ardianto, umpan

---

<sup>32</sup> Kristian Handoko, *Materi Umpan Balik Yang Cepat Dapat Diterapkan Pada Perusahaan*. Bandung: Pustaka Baru, (2006).



balik merupakan reaksi (respon) yang diberikan oleh penerima atau komunikator suatu pesan kepada pengirim pesan atau komunikator/pencetus pesan.<sup>33</sup> Umpan balik juga dapat berupa reaksi yang dihasilkan dari komunikasi dengan seorang komunikator

Umpan balik dapat digolongkan menjadi:

#### 1) Umpan Balik Internal

Pada umpan balik internal, umpan balik yang diterima komunikator bukan berasal dari komunikator melainkan dari

---

<sup>33</sup> Ardianto, E. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung: Rekatama Media, (2004).

komunikator itu sendiri atau ternyata komunikator melakukan kesalahan.

## 2) Umpan Balik Eksternal

Umpan balik eksternal adalah umpan balik yang diterima komunikator dari komunikan dan dapat bersifat langsung atau tidak langsung, dengan penjelasan sebagai berikut :

## 3) Umpan Balik Langsung

Suatu tanggapan yang dapat segera dikenali oleh komunikan. Seperti contoh mengangguk untuk menunjukkan bahwa komunikator paham, atau menggelengkan kepala sebagai tanda komunikator tidak setuju atau tidak dipahami.

4) Umpan balik tertunda atau tidak langsung (delayed feedback)

Umpan balik yang sampai pada komunikator setelah beberapa waktu. Sebagai contoh koran, media sosial, dll.

5) Umpan Balik yang Mewakili

Umpan balik yang diterima biasanya merupakan sampel yang representatif, meskipun hanya satu atau dua komunikator yang memberikan tanggapa tetapi diyakini mampu merespons berbagai komunikasi lainnya.

6) Umpan Balik Kumulatif

Umpan balik yang dikirim ke komunikator pada awalnya

dikumpulkan dan tidak langsung berubah dalam pesan berikutnya. Karena komunikator perlu mempertimbangkan hal ini terlebih dahulu untuk menetapkan pedoman nantinya.

7) Umpan Balik Kuantitatif

Umpan balik yang diterima biasanya diukur secara kuantitatif.

8) Umpan Balik di Fasilitas

Dalam umpan balik di fasilitas, fasilitas mengumpulkan umpan balik dan opini masyarakat melalui kunjungan langsung, yang dianalisis oleh fasilitas.

Hasil yang diperoleh adalah tanggapan dari informasi yang diterima.

Tentunya dalam komunikasi harus ada respon dari penerima informasi tentang unsur-unsur yang terkandung dalam penyampaian pendengar terhadap apa yang disampaikan pengirim dalam penyampaian yang jelas.<sup>34</sup> Diantaranya adalah prinsip komunikasi umpan balik yang disampaikan sebagai berikut:

- 1) Kejelasan, jelas adalah faktor penting dalam penyampaian, untuk menghindari kesalahpahaman atas informasi yang disampaikan<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Dedy Mulyana, *Human Communication*.(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000)

<sup>35</sup> Kartika Sari, *Koordinasi Dalam Komunikasi Efektif Terstruktur*.(Bogor: PT. Pusaka, 2002)

- 2) Akurasi, informasi yang akurat penting dalam penyampaian informasi
- 3) Kevalidan, isi komunikasi harus tepat dan valid sehingga mendapat respon yang baik dari penerima informasi.<sup>36</sup>

**c) Kepercayaan**

Kepercayaan, merupakan tindakan yang dilakukan untuk meyakinkan seseorang terhadap sesuatu.<sup>37</sup> Salah satunya adalah membangun kepercayaan terhadap perusahaan, bukan sekedar komitmen, namun menunjukkan langkah positif. Dalam organisasi, kepercayaan dapat

---

<sup>36</sup> Wijaya Kusuma, *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)

<sup>37</sup> Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007)

membuat umpan balik menjadi lebih mudah dan positif. Sehingga harus ada perilaku yang terlihat dengan jelas, terbuka antar individu tau kelompok dalam organisasi tersebut.

Johnson & Johnson, menyatakan bahwa kepercayaan adalah aspek hubungan yang bertahan lama dan merupakan dasar untuk membangun dan memelihara hubungan intrapersonal. Ada 5 (lima) dimensi kepercayaan, antara lain: <sup>38</sup>

- 1) Keterbukaan, yakni kesediaan seseorang untuk berbagi informasi, gagasan,

---

<sup>38</sup> Johnson, & Johnson. Emotional Intelligence. Ney Jersey: Prentice Hall Inc.(1997).

pemikiran, pendapat, perasaan, dan reaksi terhadap pengalaman.

- 2) Berbagi Kesediaan untuk berbagi keterampilan dan sumber daya yang dimilikinya dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama.
- 3) Perjanjian Berkomunikasi dengan orang lain dan menghormati pendapat mereka tentang topik yang sedang dibicarakan.
- 4) Mendukung komunikasi antara individu dengan orang lain agar orang lain mengetahui kelebihanannya dan percaya bahwa dirinya mampu menangani situasi secara produktif.



5) Kerja Sama (Niat untuk Bekerja Sama)  
Harapan Individu harus bersikap kooperatif dan kooperatif dengan orang lain guna mencapai tujuan bersama.

**d) Kreativitas**

Kreativitas merupakan naluri manusia yang terus berkembang, menghasilkan ide-ide baru dan inovasi-inovasi baru.<sup>39</sup> Menurut Munandar, dalam bukunya menyebutkan pengertian kreativitas, adalah kemampuan seseorang berpikir yang bertujuan untuk memecahkan masalah sehingga dapat ditemukan inovasi-

---

<sup>39</sup> Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Insani*. (Jakarta: Kencana, 2005)

inovasi baru.<sup>40</sup> Sehingga bisa dijelaskan bahwa kreativitas adalah suatu perilaku atau karakter seseorang, yang dilakukan dengan membuat inovasi-inovasi baru dari hal yang diperoleh.<sup>41</sup>

Bentuk kreativitas juga bisa berupa ketrampilan dan metode yang digunakan orang untuk memecahkan ide, sehingga bisa memperbarui informasi yang ada dan item lainnya. Hasil kreativitas dapat menggambarkan kelancaran berpikir dan komunikasi pendapat, serta kemampuan

---

<sup>40</sup> Munandar, *Kreativitas Dalam Bekerja Untuk Meningkatkan Mutu*. (Salatiga: Cipta Karya, 2006)

<sup>41</sup> Guntur Ujjianto, 'Analisis Pengaruh Komitmen Professional Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Bank Bukopin Yogyakarta'. *Jurnal Sinergi Kajian Bisnis* 2, no. 3 (2005)

mengembangkan ide dalam suatu organisasi.

Rhodes menyebutkan bahwa kreativitas dapat ditinjau ditinjau dari empat aspek, antara lain:<sup>42</sup>

- 1) Individu (orang) Perbuatan kreatif merupakan hasil keunikan seluruh kepribadian dalam interaksinya dengan lingkungan.
- 2) Proses Proses berpikir kreatif untuk mengembangkan ide-ide inovatif.
- 3) Produk Kreativitas yang menciptakan atau melahirkan perwujudan-perwujudan baru.

---

<sup>42</sup> Munandar, *Kreativitas Dalam Bekerja Untuk Meningkatkan Mutu*. (Salatiga: Cipta Karya, 2006)

#### 4) Pendorong (Tekanan)

Menjalin koordinasi dapat menumbuhkan rasa solidaritas antar mitra. Jika sinergi atau sinergi dilakukan dalam perusahaan kepada para karyawannya namun karyawan dapat melakukan hal yang sama sinerginya dengan pegawai lain, lalu sinergi dapat menjadi elemen kunci perusahaan. Namun di perusahaan yang tidak ada sinergi atau sinergi dalam perusahaan, akan mengarah pada konflik antar karyawan dapat menimbulkan perintah berbaris yang tidak efektif. Jika perusahaan ada sinergi antar karyawan maka produktivitas bisnis akan maksimal

dan mencapai tujuan yang disepakati dengan perusahaan.<sup>43</sup>

## **B. TEORI KOLABORASI**

### **1 . Pengertian Kolaborasi**

Kolaborasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu pola hubungan kerja yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak. Pengertian kolaborasi seringkali dijelaskan oleh para ahli yang berbeda-beda dan berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda. Definisi ini didasarkan pada prinsip yang sama, kerja sama, pembagian tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab. Secara umum kolaborasi adalah hubungan antar organisasi dimana mereka bekerja sama dan sepakat untuk mencapai tujuan bersama.

---

<sup>43</sup> Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Insani*. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015)

Mereka juga bertanggung jawab untuk berbagi informasi, berbagi sumber daya, berbagi manfaat, dan mengambil keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah.

Menurut American Heritage College,<sup>44</sup> kolaborasi merupakan kerja sama untuk menggabungkan ide-ide. Hal ini berdasarkan uraian Gray yang menggambarkan kolaborasi sebagai suatu proses berpikir di mana para pihak melihat berbagai aspek dari suatu permasalahan dan mencari solusi dari perbedaan tersebut serta batasan pandangan mereka mengenai apa yang dapat dilakukan. Kolaborasi juga diartikan sebagai kesatuan, kerja sama, pembagian tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab, dimana pihak-

---

<sup>44</sup> Kolaboratif Definition, *American Heritage Dictionary*. 4th Edition 2002

pihak yang berkolaborasi mempunyai kesamaan tujuan, kesamaan pemahaman, keinginan berproses, saling menguntungkan, integritas, kasih sayang, jujur dan berorientasi pada masyarakat.

Beberapa definisi kolaborasi , menurut ahli:

- a. Jonathan, mengartikan kolaborasi sebagai suatu proses interaksi yang berkesinambungan antara dua orang atau lebih.
- b. Menurut kamus Heritage Amerika, kolaborasi adalah bekerja Bersama dalam upaya menggabungkan ide.
- c. Gray menggambarkan kolaborasi sebagai proses berpikir di mana pihak-pihak mempertimbangkan aspek-aspek berbeda dari suatu masalah dan mencari solusi terhadap perbedaan-perbedaan

tersebut, serta batasan pendapat mereka tentang apa yang dapat dilakukan.<sup>45</sup> D.Lindeke, menjelaskan kolaborasi adalah proses kompleks yang memerlukan pertukaran pengetahuan, dan secara sadar jadi tanggung jawab<sup>46</sup>

Kolaborasi atau kerja sama tidak terbatas pada waktu atau jangka waktu tertentu, sepanjang masih ada hubungan dan hubungan dengan pihak lain, selain itu kerja sama tetap mempunyai arti penting. Berbagai pemangku kepentingan terlibat dalam kolaborasi dari tingkat individu, kelompok kerja, dan organisasi. Memahami kinerja lembaga-lembaga publik sangat penting ketika bekerja sama atau berkolaborasi.. Ada

---

<sup>45</sup> Barbara Gray, *Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems*, (San Francisco: Jossey-Bass, 1989) h.329

<sup>46</sup> Lindeke, L.L. and Sieckert, A.M, 'Nurse-Physician Workplace Collaboration.' *OJIN: The online Journal of Issues in Nursing*, 2005, Volume 10 Number 1, Manuscript 4



masa tenggang yang panjang untuk suatu kerjasama. Inilah perbedaan antara kolaborasi dan kerja sama tim. Sebagai sebuah proses, kolaborasi adalah interaksi yang berkelanjutan di antara beberapa orang.<sup>47</sup>

Kerja sama memerlukan perencanaan bersama sehingga tanggung jawab pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama. Ini dijelaskan oleh Lindeke dan Sieckert. Mereka menyatakan bahwa kolaborasi adalah proses kompleks yang memerlukan pertukaran pengetahuan yang disengaja dengan kesadaran dan tanggung jawab bersama.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Elizabeth T. Anderson & Judith M. McFarlane, *Community as Partner: Theory and Practice in Nursing*. 4th Ed. Philadelphia, 2004.

<sup>48</sup> Lindeke, L.L. and Sieckert, A.M, 'Nurse-Physician Workplace Collaboration.' *OJIN: The online Journal of Issues in Nursing*, 2005, Volume 10 Number 1, Manuscript 4

Kegiatan kolaborasi jelas dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan memahami satu sama lain. Menurut Abdulsyani, bentuk proses sosial yang didalamnya terdapat aktivitas dengan tujuan sama, saling membantu dan saling memahami di sebut kolaborasi <sup>49</sup> Demikian pula Roucek dan Warren menyatakan bahwa kolaborasi berarti bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi adalah proses sosial yang paling mendasar. kolaborasi biasanya melibatkan pembagian tugas, dengan setiap orang menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan bersama.<sup>50</sup>

Tujuan kolaborasi adalah mencapai dan mempercepat tujuan bersama. Bahkan dalam proses

---

<sup>49</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. (Jakarta: Bumi Aksara,2007)h. 156

<sup>50</sup> Ibid. h 159

mencapai suatu tujuan, tidak disarankan untuk membatasi pembagian tugas yang harus dilakukan. Hal ini diungkapkan Nawawi sebagai kerja sama merupakan upaya untuk mencapai tujuan bersama dan dengan cara saling membantu mencapai tujuan bersama sebagai satu kesatuan kerja.<sup>51</sup>

Edward M. Marshall menyatakan bahwa kolaborasi merupakan salah satu bentuk proses yang fundamental yang menciptakan kesan kepercayaan, integritas, dan terobosan dengan mencapai konsensus, kepemilikan, dan integrasi di seluruh aspek organisasi.<sup>52</sup> Di abad ke-21 saat ini, kolaborasi telah menjadi alternatif utama terhadap pendekatan hierarki.

---

<sup>51</sup> Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*.(Jakarta: Gunung Agung,1984), h. 7

<sup>52</sup> Edward M Marshall, *Transforming The Way We Work: The Power of the Collaborative Work Place*, AMACOM, 1995

Pendekatan ini dianggap sudah kuno karena memerlukan waktu yang panjang dan bertingkat. Edward mengungkapkan bahwa “Kolaborasi adalah kandidat terbaik untuk menggantikan hierarki sebagai prinsip organisasi untuk kepemimpinan dan manajemen tempat kerja di abad ke-21.<sup>53</sup>

Variabel yang mempunyai peranan penting dalam mengukur keberhasilan suatu kolaborasi menurut Graddy antara lain pembagian kerja antar instansi/lembaga, struktur lembaga, dan koordinasi (interaksi kerja). Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan kolaborasi antara lain faktor lead agency, faktor pemberian layanan, dan faktor infrastruktur (sumber daya).

---

<sup>53</sup> Ibid

Menurut Anna Janine dan Wanna, kolaborasi mengacu pada kerjasama dengan pihak lain, artinya masing-masing pihak, kelompok, atau organisasi dari beberapa perusahaan bekerja sama. Kata kolaborasi muncul pada abad ke-19 sebagai akibat dari perkembangan industrialisasi, organisasi yang semakin kompleks, serta pembagian kerja dan tugas yang semakin beragam.<sup>54</sup>

## **2. Karakteristik dan Prinsip Dasar Kolaborasi**

Menurut Carpenter, kolaborasi memiliki delapan karakteristik. antara lain:

- a. Tidak ada batasan atau hierarki untuk berpartisipasi.

---

<sup>54</sup> Janine and John Wanna, *Collaborative Governance: A New Era Of Public Policy In Australia?*. (Australia: ANU E Press. 2008) h.3

- b. Peserta bertanggung jawab atas keberhasilan .
- c. Ada tujuan yang rasional.
- d. Terdapat definisi masalah.
- e. Para peserta saling melatih dan mengajar.
- f. Pilihan yang berbeda diidentifikasi dan diuji.
- g. Implementasi solusi dilakukan bersama oleh banyak peserta yang terlibat
- h. para peserta selalu mengetahui apa yang sedang terjadi<sup>55</sup>

Untuk mencapai hasil maksimal dari kolaborasi, ada faktor yang harus di perhatikan seperti budaya, kepemimpinan, strategi yang digunakan, tim yang terlibat , dan struktur organisasi /lembaga.

---

<sup>55</sup> Carpenter, Mason. A. & Sanders, Wm, Gerard, *Strategic Management: A Dynamic Perspective*. 2nd Edition, (New Jersey: Pearson Printice Hall, 2009)

Noorsyamsa Jumara menyatakan bahwa ada lima faktor kunci untuk meningkatkan kolaborasi;

a. Budaya kolaboratif.

Seperangkat nilai yang membentuk perilaku dan sikap organisasi, mengacu pada kebiasaan orang-orang yang bekerja sama.

b. Kepemimpinan kolaboratif.

Kekompakan merupakan fungsi situasional, dan tidak hanya dalam hierarki setiap posisi, yang mencakup semua orang dalam organisasi.

c. Visi yang strategis.

Prinsip-prinsip panduan dan tujuan keseluruhan dari organisasi didasarkan pada pembelajaran dari kolaborasi internal dan secara

strategis selaras dengan identitas dan peran yang bernilai tambah di pasar.

d. Proses tim kolaboratif.

Kumpulan proses kerja non-birokrasi yang dikelola oleh tim kolaboratif yang terdiri dari profesional yang bertanggung jawab penuh atas kesuksesan mereka dan mempelajari keterampilan yang memungkinkan kemandirian.

e. Sistem Kerjasama.

Peningkatan diri sistem pendukung organisasi/lembaga (khususnya sistem informasi dan sumber daya manusia) untuk memastikan keberhasilan tempat kerja kolaboratif. Anggota adalah kelompok internal yang memandang



organisasi sebagai pelanggan dan berfokus pada kualitas dalam semua aspek pekerjaan mereka.<sup>56</sup>

### **3. Nilai-Nilai Inti Kolaborasi atau Kerjasama**

Menurut Djumara terdapat tujuh nilai inti (7 *core value*) yang diamalkan dalam meningkatkan hubungan industrial dengan konsep kerjasama, antara lain :

- a. Menghargai orang lain (menghormati orang lain), landasan terpenting suatu organisasi adalah kepuasan setiap individu. Setiap orang yang bekerja sama menginginkan posisi yang kuat dan kesetaraan. Mereka menginginkan kepuasan

---

<sup>56</sup> Noorsyamsa Djumara, *Negosiasi, Kolaborasi Dan Jejaring Kerja*. (Jakarta:Lembaga Administrasi Negara-RI, 2008), h. 34-35

pribadi yang tinggi dan lingkungan kerja yang mendukung dan menumbuhkan kepuasan dirinya.

- b. Perhormatan dan penghargaan terhadap kinerja, di banyak budaya, kehormatan dan integritas membentuk perilaku individu manusia.
- c. Ada rasa memiliki dan bekerja bersama. Karyawan semua merasa memiliki tempat kerja, pekerjaan, dan perusahaannya, secara otomatis mereka akan menjaga dengan baik
- d. Konsensus adalah kesepakatan atau harus ada keinginan untuk mencapai satu tujuan bersama
- e. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas, dalam paradigma hierarki, seseorang biasanya menutup diri satu sama lain berdasarkan deskripsi pekerjaan, tugas, dan unit organisasi. Pada

kenyataannya setiap individu bekerja sesuai tupoksi nya

- f. Hubungan saling percaya (trust connection). Setiap orang mengharapkan kepercayaan dan keterbukaan dalam pekerjaannya. Secara umum, mereka ingin orang mempercayai mereka. Namun kepercayaan tidak datang dengan mudah. Kenyataannya, banyak dari mereka yang kurang percaya satu sama lain.
- g. Pengakuan , yang sama pentingnya dalam tempat kerja kolaboratif adalah upaya untuk mendorong orang bekerja dan membuat hasil pekerjaannya diakui oleh seluruh anggota tim atau kelompok.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*. (Jakarta: PrenadaMedia, 2004) h. 38

#### 4. Bentuk dan Prinsip Kerja Sama/ Kolaborasi

##### a. Kolaborasi Primer

Ciri utama kolaborasi primer adalah kelompok dan individu sebenarnya digabungkan menjadi satu kelompok. Menurut Ahmadi, kelompok ini mencakup seluruh hidup individu, yang masing-masing berjuang untuk pekerjaan satu sama lain demi kemaslahatan seluruh anggota kelompok<sup>58</sup>

##### b. Kolaborasi sekunder

Jika kerja sama primer merupakan ciri masyarakat primitif dan modern. Menurut Ahmadi, kerja sama sekunder ini sangat formal, dimana setiap

---

<sup>58</sup> Pamudji, *Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah: Suatu Tinjauan Dari Segi Administrasi Negara*,. (Jakarta: Bina Aksara, 1985) h 12-13

individu hanya menyumbangkan sebagian hidupnya kepada kelompok di mana ia terlibat. Sikap orang-orang di sini lebih individualistis dan penuh perhitungan. Contohnya termasuk kolaborasi di kantor pemerintah, pabrik, dan lainnya<sup>59</sup>

c. Kerja Sama / Kolaborasi Tersier

Berbeda dari kerja sama primer dan sekunder, kerja sama tersier didasarkan pada adanya potensi konflik. Menurut Ahmadi, kerja sama tersier ini didasari oleh sikap pihak-pihak yang melaksanakan kerja sama murni bersifat oportunis. Organisasi mereka sangat longgar sehingga mudah berantakan. Contohnya adalah hubungan antara pekerja dan manajemen perusahaan, hubungan dua pihak dalam

---

<sup>59</sup> Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*. (Jakarta: PrenadaMedia, 2004) h. 38

konflik, dan hubungan antara dua pihak dengan pihak ketiga, kerja sama, atau dengan kata lain kerja sama, ketika sarana bersama tidak lagi sesuai dengan tujuan masing-masing<sup>60</sup>

Tomoson Dan Perry pernah menyatakan bahwa para ahli pada umumnya sepakat bahwa perbedaan antara koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi terletak pada interaksi, integrasi, komitmen, dan kompleksitas. Kolaborasi ada di level tertinggi. Keberhasilan pelaksanaan kerjasama memerlukan prinsip-prinsip dasar yang diakui secara umum. Hal ini dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker Keban yang menyatakan bahwa prinsip dasar yang diterapkan secara umum merupakan

---

<sup>60</sup> Ibid. h 39

prinsip dasar dalam konsep good governance, adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, efektivitas, konsensus dan saling menguntungkan dan maju bersama.<sup>61</sup> Di sisi lain, Pamudji mengatakan kerjasama pada hakikatnya berarti adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai tujuan bersama.

## **5. Manfaat dan Tujuan Kerjasama**

Sebelum menentukan kerjasama seperti apa yang akan di lakukan, maka lembaga dan pihak lain harus memahami persoalan saat ini atau yang akan datang. Charles Harton Cooley, menyatakan sebelum

---

<sup>61</sup> Pamudji, *Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah: Suatu Tinjauan Dari Segi Administrasi Negara*,.

kolaborasi terjadi, maka masing masing pihak harus memahami beberapa hal:

- a. masing masing pihak sadar bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan sekaligus mempunyai pengetahuan dan pengendalian diri yang cukup untuk mewujudkan kepentingan tersebut melalui kerjasama.
- b. masing masing pihak sadar adanya kesamaan kepentingan dan keberadaan organisasi/lembaga merupakan fakta penting dalam kolaborasi<sup>62</sup>

Kolaborasi adalah bentuk inovasi yang dilakukan oleh beberapa lembaga dalam melakukan kegiatan yang serupa. Dengan berinovasi untuk

---

<sup>62</sup> Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*. (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2004), h. 156.



memungkinkan para pihak yang berkepentingan dapat mencapai tujuan secara efektif. Oleh karena itu, inovasi dalam kolaborasi memerlukan tujuan yang positif. Tujuan tersebut meliputi ; memecahkan masalah, menciptakan sesuatu, menemukan sesuatu dalam menghadapi serangkaian rintangan. Emily R. Lai mengartikan kolaborasi sebagai "keterlibatan dan kesepakatan para pihak yang terkoordinasi untuk bersama-sama memecahkan masalah."<sup>63</sup>

## **6. Tahapan Kolaborasi / Kerja sama**

Terdapat tiga tahapan kolaborasi , yaitu:

- a. *Problem Setting*, merupakan upaya mengidentifikasi masalah, menentukan sumbernya, dan membuat kesepakatan untuk

---

<sup>63</sup> Lai, Emily R., 'Collaboration: A Literature Review'.2011.

berkolaborasi dengan pihak yang bekepentingan lainnya.

- b. *Direction Setting*, mencakup penetapan aturan dasar , penetapan agenda, dan pengorganisasian sub kelompok
- c. *Implementation*, aturan dasar yang sudah disepakati dan ditetapkan harus menjadi pedoman dalam pelaksanaannya dan selalu di pantau

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penerapan kolaborasi diperlukan beberapa langkah utama, antara lain: motivasi dan inisiatif, media informasi, analisi situasi, negosiasi dan kesepakatan para pihak, membangun kapasitas untuk perubahan.analisis kemitraan dan implementasi, menciptakan dan memelihara proses, membuat

mekanisme pengelolaan konflik Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kolaborasi, yaitu : saling menghormati dan transparan, ada pembagian tugas dan tanggung jawab, efektifitas hubungan kerja, terdapat kearifan lokal, memahami perbedaan, bersifat adaptif dan berkelanjutan, tepat mempertimbangkan kepentingan yang cakupannya lebih luas<sup>64</sup>

Ansell dan Gash menjelaskan bahwa tata kelola kolaboratif sangatlah penting. Hal ini dikarenakan dilatarbelakangi oleh perkembangan organisasi berdasarkan aktivitas organisasi dalam kurun waktu tertentu, tumbuhnya pengetahuan, kemampuan institusi atau organisasi, dan pengalaman dari lingkungan dimana organisasi tersebut beroperasi

---

<sup>64</sup> Steven L., Yaffee and Julia Wondolleck, 'Collaborative Ecosystem Planning Processes in the United States: Evolution and Challenges.' . (Jurnal Environments, 2003) h. 59–72

.<sup>65</sup>Menurut Henry, kerja sama antar pemerintah daerah pada awalnya ditujukan untuk: sebagai kegiatan perorangan, berkaitan dengan suatu pelayanan dan bukannya suatu fasilitas, bersifat tidak permanen; dan sebagai kegiatan “siaga” yang dilakukan hanya apabila timbul keadaan tertentu dan kerja sama itu diijinkan <sup>66</sup>

Namun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kerja sama antar pemerintah daerah dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk perjanjian dan dalam bentuk pengaturan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rosen yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk kontrak/ perjanjian dapat dibedakan sebagai berikut: perjanjian kerjasama dibuat atas dasar

---

<sup>65</sup> Sudarmo, *Isu-Isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*,. (SMART Media, MAP UNS, 2011)

<sup>66</sup> Henry, N, *Public Administration and Public Affairs*. Sixth Edition.( Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1995)

perjanjian tidak tertulis dan yang kedua didasarkan atas perjanjian tertulis<sup>67</sup> Bentuk kerjasama yang pertama (perjanjian jabat tangan) merupakan bentuk kerjasama yang seringkali menimbulkan konflik dan kesalahpahaman. Sebab, tidak ada aturan tertulis dalam melakukan kerja sama dan tidak ada pembagian wewenang yang jelas antar para pihak. Namun pada bentuk kerja sama yang kedua (perjanjian tertulis), terdapat ketentuan tertulis mengenai apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan bersama, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahpahaman relatif kecil.

---

<sup>67</sup> Rosen, E.D, *Improving Public Sector Productivity: Concept and Practice*. (London: Sage Publications, International Educational and Professional Publisher, 1993), h. 218-222.

Rosen, mengusulkan bentuk-bentuk perjanjian kerja sama ada beberapa bentuk, antara lain: <sup>68</sup>

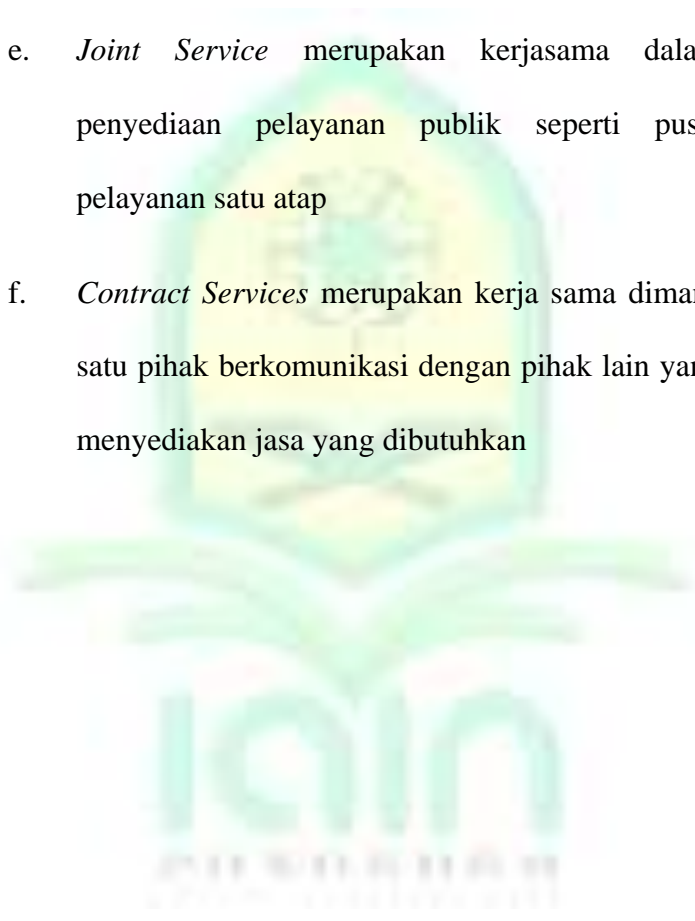
- a. *Concostia* : merupakan pengaturan kerjasama dengan sharing sumber daya karena jatuhnya kan lebih mahal jika di kerjakan sendiri sendiri
- b. *Joint Purchasing* : merupakan pengaturan kerjasama dengan melakukan pembelian barang secara bersama untuk mendapatkan harga yang lebih murah
- c. *Equipment Sharing*: merupakan penggunaan perlengkapan yang mahal secara bersama
- d. Koperasi Pembangunan : yaitu perjanjian kerjasama dalam pembangunan gedung-gedung

---

<sup>68</sup> Ibid. h 222

seperti pusat rekreasi, gedung perpustakaan, tempat parkir mobil, gedung acara

- e. *Joint Service* merupakan kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik seperti pusat pelayanan satu atap
- f. *Contract Services* merupakan kerja sama dimana satu pihak berkomunikasi dengan pihak lain yang menyediakan jasa yang dibutuhkan



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kabupaten Ponorogo, yaitu di kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas Kabupaten Ponorogo) dan di beberapa rumah yang mendapatkan bantuan penyediaan hunian layak bagi mustahik. Baznas Kabupaten Ponorogo berada di jalan Trunojoyo nomor 143, Kelurahan Kauman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo

#### **B. Profil Lembaga**

##### **1. Sejarah singkat berdirinya Baznas Ponorogo**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya lembaga resmi yang



dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001, yang mempunyai misi dan fungsi mengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di tingkat nasional untuk dihimpun dan didistribusikan. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan Zakat di tingkat nasional.<sup>1</sup>

Undang-undang tersebut menyatakan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri

---

<sup>1</sup> 'Http.Baznasponorogo.or.Idprofile-Baznas.Htm'. diakses pada tanggal 1 April 2024, pukul 21.00

Agama. Baznas Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dirjen dengan BIMAS ISLAM nomor DJ.II/37 Tahun 2015.

Baznas Ponorogo merupakan lembaga non structural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawan kepada Bupati Ponorogo. Dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Ponorogo.<sup>2</sup> Sebelum tahun 2016 Baznas bernama BAZDA dan masih berada di bawah naungan Kementerian Agama, sehingga kantornya pun saat itu ada di Kemenag Ponorogo. Tetapi sejak tahun 2016, pimpinan Baznas di lantik oleh Bupati Ponorogo. Pimpinan Baznas waktu itu diambilkan dari tokoh masyarakat yang berpengalaman baik itu di pemerintahan ataupun di organisasi masyarakat Islam. Di awal 2016 Baznas Ponorogo berpindah kantor di jalan Dr. Soetomo, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo jadi satu dengan Kantor Palang Merah Indonesia (PMI). Barulah sekitar tahun

---

<sup>2</sup> 'Http.Baznasponorogo.or.Idprofile-Baznas.Htm'. diakses pada tanggal 1 April 2024, pukul 21.10

2019, kantor Baznas Ponorogo pindah ke jalan Trunojoyo 143, kelurahan Kauman, Kecamatan Ponorogo hingga saat ini.

## **2. Visi dan Misi Baznas Ponorogo**

### **a. Visi Baznas Kabupaten Ponorogo**

“Terwujudnya Baznas Kabupaten Ponorogo yang Amanah, Transparan dan Profesional”<sup>3</sup>

Baznas Ponorogo bertanggung jawab untuk mengelola zakat di kabupaten Ponorogo, baik zakat profesi yang berasal dari para Aparatur Sipil Negara maupun dari masyarakat umum. Dalam pelaksanaan berpedoman pada visi

---

<sup>3</sup> ‘[Http.Baznasponorogo.or.Id/profile-Baznas.Htm](http://Baznasponorogo.or.Id/profile-Baznas.Htm)’. diakses pada tanggal 1 April 2024, pukul 21.15

sehingga dapat benar benar menjadi lembaga yang dipercaya dan terpecaya untuk mengelola Zakat Infaq dan Shodaqoh ) dari masyarakat.

**b. Misi Baznas Ponorogo<sup>4</sup>**

- 1) Meningkatkan kesadaran Umat untuk menunaikan ZIS melalui BAZNAS maupun LAZ
- 2) Meningkatkan pengimpunan dan pendayagunaan ZIS sesuai dengan ketentuan syariat dengan prinsip manajemen moderen

---

<sup>4</sup> 'Http.Baznasponorogo.or.Idprofile-Baznas.Htm'. diakses pada tanggal 1 April 2024, pukul 21.20

- 3) Meningkatkan pengelola/Amil Zakat yang Amanah, Transparan, Profesional dan Terintegrasi
- 4) Mewujudkan pusat data Zakat di Kabupaten Ponorogo
- 5) Memaksimalkan peran Zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Ponorogo melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat menyebutkan tujuan pendayagunaan zakat, antara lain:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pelayanan pengelolaan Zakat

2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kebaikan bersama dan mengurangi kemiskinan.

Tujuan pertama pengelolaan zakat menjadi pedoman pengumpulan dan pendistribusian zakat. Oleh karena itu, strategi untuk mencapai target pengumpulan dan penyaluran zakat keseluruhan harus dilakukan secara simultan terintegrasi dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, ada enam aspek yang perlu diterapkan untuk mencapai kebangkitan zakat nasional<sup>5</sup>

1) Aspek Hukum, meliputi penerbitan Surat Keputusan pembentukan lembaga BAZNAS

---

<sup>5</sup> Dokumentasi “Profil Lembaga” dari Baznas Kabupaten Ponorogo yang diberikan pada tanggal 1 April 2024

dan Surat Keputusan Pimpinan Baznas Kabupaten Ponorogo

- 2) Aspek Akuntabilitas, Baznas Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh selalu menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Tahunan. Sehingga ada rel dan pedoman yang disahkan setiap tahun oleh Baznas Propinsi Jawa Timur secara rutin. Audit oleh Kantor Akuntan Publik juga rutin dilakukan. Sedangkan untuk laporan secara berkala, triwulan, semester dan tahunan dilaporkan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Ponorogo.
- 3) Aspek Teknologi IT , Dalam pelaksanaan harian, kantor Baznas Kabupaten Ponorogo menggunakan SiMBA yang terintegrasi



dengan Baznas Provinsi Jawa Timur dan Baznas RI. SiMBA dirancang untuk memudahkan semua transaksi masuk dan keluar, sehingga rekapitulasi bulanan bisa dengan mudah dilaporkan. SiMBA juga membantu menyimpan data dan informasi zakat, infaq secara nasional.

- 4) Aspek Penyaluran, penyaluran ZIS di Baznas Ponorogo selalu pada miustahik yang termasuk ke dalam 8 asnaf (orang-orang yang berhak menerima zakat). Untuk Infaq selalu mengedepankan masyarakat fakir atau miskin. Semakin tinggi pengumpulan yang didapat maka semakin banyak masyarakat miskin terbantu

5) Aspek Pengumpulan, Optimalisasi pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS), didukung penuh oleh Sekretaris Daerah dan Bupati Ponorogo. Pada prakteknya masih di perlukan banyak edukasi dan literasi zakat kepada calon dan muzakki. Sehingga ada kesefahaman tentang manfaaf ZIS untuk menyokong pembangunan daerah utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Keberadaan Amil di BAZNAS Ponorogo yang amanah, akan menambah kepercayaan muzakki untuk menitipkan ZIS nya di BAZNAS Ponorogo.

6) Aspek Pengembangan Amil Zakat. Kemampuan dan kompetensi Amil Baznas Ponorogo harus

selalu ditingkatkan. Sehingga setiap ada pelatihan yang di adakan oleh Baznas Propinsi Jawa Timur maupun Baznas RI. Amil Baznas Ponorogo diusahakan selalu ikut, baik untuk pimpinan maupun untuk pelaksana.

### **3. Struktur Baznas Ponorogo<sup>6</sup>**

Struktur organisasi di Baznas Ponorogo tahun 2021 sampe sekarang sebagai berikut:

Ketua	:	Kholid, S. Ag., M.Pd
Wakil Ketua I	:	Mukarobin, M.PdI
Wakil Ketua II	:	Dr. Asvin Abdurrahman, M. Pd
Wakil Ketua III	:	Dr. Agus Setyawan, M.SI
Wakil Ketua IV	:	Yuni Ahad Diana, S.Si
Kepala Pelaksana	:	Sukarni, S.Sos, M.M
Staf Pendistribusian	:	1. Nur Arifin 2. Sucipto

---

<sup>6</sup> Dokumentasi Profil Lembaga dari Baznas Kabupaten Ponorogo yang diberikan pada tanggal 1 April 2024

- Staf Pengumpulan : 1. Rudi A  
2. Eka Rahayu
- Staf Pelaporan : 1. Rizky A  
2. Fitriyah U.
- Staf Adiministrasi : 1. Ashyar Hudaya  
2. Intan Sherly M.

### **Program-program Baznas Ponorogo**

Program Baznas Kabupaten Ponorogo, antara lain: <sup>7</sup>

a. Ponorogo Taqwa

Pendistribusian ZIS yang mengarah pada peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran islam, baik pada program tahfid sekolah sekolah, pembinaan guru

---

<sup>7</sup> Diana, Wawancara Wakil Ketua IV Baznas Ponorogo. 5 Februari 2024

madrasah dan pengadaan sarana prasarana masjid, musholla ataupun madrasah.

b. Ponorogo Cerdas

Pendistribusian ZIS juga mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA melalui pemberian beasiswa secara rutin tiap bulan. Serta program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) untuk mahasiswa yang diberikan tiap semester hingga lulus maksimal 4 (empat) tahun (tepat waktu).

c. Ponorogo Makmur

Pendistribusian ZIS juga diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan.

Program hibah bantuan modal usaha untuk UMKM, dan bank zakat mikro diharapkan dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bisa menciptakan muzakki muzakki baru.

#### d. Ponorogo Sehat

Pendistribusian ZIS juga membantu masyarakat kurang mampu di bidang kesehatan, yaitu biaya perawatan rumah sakit, akomodasi berobat, dan pembayaran premi, BPJS.

#### e. Ponorogo Peduli

Pendistribusian ZIS meringankan beban masyarakat yang terkena musibah bencana alam longsor, kebakaran, rumah roboh/ambruk

ataupun rumah tidak layak huni melalui program bedah rumah dan plesterisasi lantai, dan juga santunan rutin biaya hidup untuk lansia hingga meninggal

#### 4. Gambaran Informasi Pengumpulan dan Pendistribusian Baznas Ponorogo



Gambar 3.1

Pengelolaan Zakat Baznas Ponorogo tahun 2023

Pada tahun 2023 Baznas Ponorogo mengumpulkan Zakat, Infaq dan Shodaqoh sebesar 5.713.827.978. Dari gambar diatas tertera total pendistribusian adalah 4.341.517.158, 40,62% atau sebesar 1.763.375.835 untuk program Ponorogo Peduli dengan jumlah penerima manfaat 7,192 mustahik, 28,80% senilai 1.250.618.400 di salurkan untuk program Ponoroggo Cerdas dengan jumlah penerima manfaat 1.727 mustahik. Berikutnya 13,3% atau 577.564.654 disalurkan melalui program Ponorogo Taqwa, dengan jumlah penerima manfaat 36 mustahik. 9,88% senilai 429.158.269 didistribusikan melalui program Ponorogo Sehat dengan penerima manfaat sebanyak 3291 mustahik. Dan 7,39% atau 320.800.000 di salurkan melalui



program Ponorogo Makmur dengan jumlah penerima manfaat 214 mustahik.<sup>8</sup>

### **C. Program Penyediaan Rumah Layak Huni**

#### **1. Latar Belakang Program**

Program penyediaan hunian layak bagi mustahik di Baznas Ponorogo berupa program bedah rumah dan program plesterisasi lantai. Program ini dilatarbelakangi karena masih banyak jumlah masyarakat Ponorogo yang berada dibawah garis kemiskinan. Data dari Dinas Sosial dan BPS Ponorogo, di tahun 2021 jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Ponorogo 17.000. Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum

---

<sup>8</sup> 'LAP BAZNAS-1.Pdf'. Annual Report Baznas 2023, Dokumentasi dari Baznas Kabupaten Ponorogo yang diberikan pada tanggal 2 Mei 2024

dan Perumahan Rakyat dan Dinas Sosial termasuk Baznas Ponorogo juga dilibatkan untuk melakukan percepatan percepatan program untuk penyediaan hunian layak. Baznas Ponorogo fokus pada dua program, secara bertahap dan berkelanjutan membantu menyediakan hunian layak rutin tiap bulan. Mulai tahun 2022 bersama pemerintah daerah, dan masyarakat Baznas Ponorogo bekerja sama dalam program plesterisasi lantai.<sup>9</sup>

#### 1. Sumber Dana Program Penyediaan Hunian Layak

Program bedah rumah dan plesterisasi lantai hanya salah dua dari banyaknya program di Baznas Ponorogo. Program bedah rumah bersal

---

<sup>9</sup> Diana, Wawancara Wakil Ketua IV Baznas Ponorogo. 5 Februari 2024

dari dana zakat yang dikumpulkan dari khususnya para ASN di Kabupaten Ponorogo, dari Baznas Propinsi Jawa Timur dan dari Baznas RI. Sedangkan plesterisasi lantai sumber dana nya dari hibah pemerintah daerah, Baznas Kabupaten Ponorogo dan Baznas Propinsi Jatim.

## 2. Sasaran Program Penyediaan Hunian Layak

Sasaran program bedah rumah dan plesterisasi lantai Baznas Kabupaten Ponorogo adalah rumah tidak layak huni yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Target rutin tiap bulan untuk program bedah rumah adalah 2 sampai 4 rumah, bisa lebih ketika ada bencana alam. Penetapan jumlah rumah yang dibantu didasarkan atas Rapat Pleno Pimpinan dan Staf Bagian Pendistribusian. Untuk program

plesterisasi lantainya jumlahnya menyesuaikan anggaran hibah pemerintah daerah, hibah dari Baznas Jatim ataupun kolaborasi.

Adapun kriteria rumah tidak layak huni yang mendapatkan program bedah rumah ataupun plesterisasi lantai adalah:

a. Stuktur bangunan

Tim Survey Baznas Ponorogo yang akan melihat langsung ke lokasi tentang layak tidaknya rumah tersebut dibantu. Rumah dengan kerusakan terparah akan menjadi skala prioritas. Contoh rumah korban kebakaran, korban tanah longsor, korban rumah ambruk yang memang tidak punya tempat tinggal lain, sehingga harus menumpang ke rumah tetangga atau saudara.

b. Legalitas kepemilikan

Rumah yang akan dibantu melalui program bedah rumah ataupun plesterisasi lantai harus jelas kepemilikannya. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan kedepannya

c. Faktor ekonomi

Pemilik rumah harus masuk dalam 8 (delapan) golongan asnaf, golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini bisa dilihat dari jenis pekerjaan, jumlah penghasilan, dan jumlah keluarga yang ditanggung. Sehingga bisa diketahui layak atau tidak menerima bantuan atau termasuk dalam golongan mustahik atau tidak.

d. Tidak menerima bantuan dari pemerintah

Tim survey Baznas Kabupaten Ponorogo akan menyeleksi calon penerima manfaat. Apakah mereka menerima bantuan dari pemerintah baik yang bentuknya sama ataupun berbeda. Dan dihiung kembali apakah masih layak untuk tetap menerima bantuan dari Baznas Ponorogo.<sup>10</sup>

3. Kriteria dan prosedur pengajuan bantuan penyediaan hunian layak

a. Kriteria calon penerima bantuan

Dalam pelaksanaanya, calon penerima anfaat harus memenuhi kriteria, antara lain: <sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Dokumentasi SOP Pendistribuaian dari Baznas Kabupaten Ponorogo yang diberikan pada tanggal 2 Mei 2024

- 1) Memiliki KTP Ponorogo atau Identitas lain yang berlaku
- 2) Bangunan rumah berdiri diatas milik sendiri, dibuktikan dengan sertifikat atau keterangan dari pemerintah desa/kelurahan
- 3) Bukan keluarga penerima bantuan dari pemerintah yang sudah tercukupi kebutuhannya
- 4) Rumah yang ditempati memenuhi kriteria tidak layak huni yaitu tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan lingkungan sosial, yaitu:
  - a) Rumah sudah rusak/tidak permanen
  - b) Lantai beralaskan tanah/batah/rabat yang sudah rusak

- c) Atap sudah rusak/banyak bocor/penyangga atap lapuk/dicongkok
  - d) Dinding terbuat dari gedek/sudah lapuk
  - e) Rumah belum ada MCK
- b. Prosedur pengajuan bantuan hunian layak

Untuk mengajukan bantuan perbaikan hunian layak ke Baznas Ponorogo melalui prosedur, yaitu:

- 1) Permohonan bantuan dari desa/kelurahan tempat tinggal
- 2) Surat Keterangan Fakir Miskin
- 3) Fotokopi KTP
- 4) Fotokopi KK
- 5) Foto rumah (tampak depan, tampak belakang dan tampak samping)



#### 4. Penyaluran Program

Pelaksanaan program penyediaan hunian layak, didahului dengan perencanaan, sehingga ada pedoman dan tujuan kegiatan bisa tercapai dengan baik. <sup>12</sup>Perencanaan di susun berdasar pengajuan yang masuk, yang selanjutnya di lakukan survey. Hasil survey dilaporkan pada rapat pleno baznas, untuk selanjutnya biasa diputuskan untuk dibantu/ tidak. Dalam perencanaan juga di susun skala prioritas rumah calon penerima manfaat mana yang didahulukan.

Program penyediaan hunian layak ini akan dapat terlaksana dengan baik, jika perencanaannya juga disusun dengan baik. Setelah diputuskan

---

<sup>12</sup> Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*. (Jakarta, Gunung Agung : 2008).

calon mustahik, maka berikutnya adalah mengumpulkan calon penerima manfaat bersama dengan pemerintah desa/kelurahan untuk selanjutnya diberi pengarahannya tentang tata laksana program. Selanjutnya Baznas Ponorogo meminta pemerintah desa/kelurahan dan keluarga calon penerima manfaat berembung untuk membentuk panitia pelaksana. Panitia pelaksana bertugas untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB yang sudah tersusun menjadi dasar besaran dana yang akan dibantu oleh Baznas. Diputuskan dalam rapat pleno Pimpinan untuk bantuan penyediaan hunian layak bedah rumah adalah sebesar 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan plesterisasi lantai besarnya 1.500.000.(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pelaksanaan kegiatan penyediaan hunian layak huni disepakati antara pihak keluarga penerima manfaat dan juga panitia, kemudian Baznas memberikan secara simbolis bantuan tersebut. Periode pelaksanaan program juga di beritahukan pihak panitia kepada Baznas Ponorogo sehingga tim monitoring lebih mudah dalam proses monitoring program. Batas waktu yang ditentukan selama dalam periode pelaksanaan program akan didokumentasikan panitia dan juga tim monitoring sebagai bahan laporan pelaksanaan program.

Evaluasi kegiatan penyaluran penyediaan hunian layak dilakukan setelah kegiatan selesai dan laporan juga selesai dikerjakan. Evaluasi merupakan agenda yang penting dalam menilai

kinerja hasil dari sebuah kebijakan<sup>13</sup> Monitoring dan evaluasi biasanya dilakukan oleh tim pendamping program, baik yang merupakan program murni dari Baznas Ponorogo, maupun yang kolaborasi dengan Baznas Propinsi Jatim maupun Baznas RI.<sup>14</sup>

#### 5. Daftar Penerima Bantuan Hunian Layak Bedah Rumah dan Plesterisasi Lantai<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Subarsono, Analisis Kebijakan Publik- Konsep,Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014)

<sup>14</sup> Diana, Wawancara Wakil Ketua IV Baznas Ponorogo. 5 Februari 2024

<sup>15</sup> Dokumentasi dari Baznas Kabupaten Ponorogo yang diberikan pada tanggal 2 Mei 2024

**Tabel 3.1**

**Daftar Wilayah Penerima Bedah Rumah**

**Baznas Ponorogo 2022**

NO	Kecamatan	Jumlah Mustahik
1.	Ngebel	22
2.	Jambon	4
3.	Bungkal	1
4.	Pulung	3
5.	Jenangan	1
6.	Ponorogo	2
7.	Babadan	6
8.	Mlarak	2
9.	Ngrayun	2
10.	Balong	2
11.	Sawoo	3
12.	Badegan	3
13.	Siman	2
<b>TOTAL</b>		<b>53</b>

**Tabel 3.2**

**Data Wilayah Penerima Bantuan Bedah Rumah  
Kolaborasi Baznas RI 2022**

<b>NO</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Mustahik</b>
1	Sawoo	1
2	Ponorogo	1
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

**Tabel 3.3**

**Data Wilayah Penerima Bantuan Bedah Rumah  
Kolaborasi Baznas Jatim 2022<sup>16</sup>**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Mustahik</b>
1.	Siman	1
2.	Pulung	1
3	Mlarak	1
4.	Babadan	4
5.	Jambon	1
6.	Sawoo	4
7.	Badegan	2
8.	Ponorogo	1
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>

---

<sup>16</sup> Dokumentasi Laporan Pendistribusian dari Baznas Kabupaten Ponorogo yang diberikan pada tanggal 2 Mei 2024

**Tabel 3.4**  
**Data Wilayah Penerima Bantuan Bedah Rumah**  
**Kolaborasi**  
**Baznas Jatim 2023<sup>17</sup>**

<b>NO</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Mustahik</b>
1.	Babadan	2
2.	Badegan	1
3.	Kauman	1
4.	Jetis	1
5	Siman	1
6	Balong	4
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>

**Tabel 3.5**  
**Daftar Wilayah Penerima Bantuan Plesterisasi Lantai 2022**

<b>NO</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Mustahik</b>
1.	Slahung	178
2.	Balong	158
3.	Jambon	103
4.	Sawoo	114
5	Sampung	113
<b>TOTAL</b>		<b>666</b>

---

<sup>17</sup> Dokumentasi Laporan Pendistribusian dari Baznas Kabupaten Ponorogo yang diberikan pada tanggal 2 Mei 2024

**Tabel 3.6**

**Daftar Wilayah Penerima Bantuan Plesterisasi Lantai  
Kolaborasi  
Baznas Jatim 2022<sup>18</sup>**

<b>NO</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Mustahik</b>
1.	Sooko	3
2.	Babadan	12
3.	Ponorogo	13
4.	Siman	4
5.	Kauman	1
<b>TOTAL</b>		<b>33</b>

---

<sup>18</sup> Dokumentasi Laporan Pendistribusian dari Baznas Kabupaten Ponorogo yang diberikan pada tanggal 2 Mei 2024



**Tabel 3.7**  
**Daftar Wilayah Penerima Bantuan Plesterisasi Lantai**  
**2023**

<b>NO</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Mustahik</b>
1.	Ponorogo	15
2.	Babadan	15
3.	Siman	20
4.	Njenangan	20
5.	Pudak	30
6.	Mlarak	20
7.	Sukorejo	20
8.	Kauman	20
9.	Badegan	20
<b>TOTAL</b>		<b>200</b>

### **5. Realisasi Program Penyediaan Hunian Layak**

Program bedah rumah akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan program plesterisasi lantai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah.). Bantuan 20 juta untuk bedah rumah tidak di

serahkan semua berupa uang, tetapi 15 juta berupa barang sesuai RAB yang di ajukan panitia dan 5 juta berupa uang tunai untuk membantu ongkos tenaga. Sedangkan untuk plesterisasi lantai diberikan berupa pasir dan semen, senilai Rp. 1.500.000,-. Bahan yang dibutuhkan bisa berupa apa saja menyesuaikan kebutuhan rumah masing masing penerima manfaat<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Diana, Wawancara Wakil Ketua IV Baznas Ponorogo. 2 Mei 2024

**BAB IV**

**SINERGISTAS BAZNAS, PEMERINTAH DAN**

**MASYARAKAT**

**DALAM HAL KOMUNIKASI EFEKTIF**

**A. Data Pola Komunikasi antara Baznas, Pemerintah dan Masyarakat Ponorogo dalam Penyediaan Hunian Layak**

Komunikasi yang dilakukan oleh Baznas, pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan hunian layak dilakukan secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

## 1. Perencanaan

Baznas Ponorogo mempunyai banyak program, diantaranya Ponorogo Peduli yang didalamnya ada program bedah rumah dan plesterisasi lantai, seperti yang diterangkan oleh bapak Asvin Abdurrahman sebagai Wakil Ketua II Baznas Ponorogo yang membidangi Pendistribusian ZIS, sebagai berikut: <sup>1</sup>

“Baznas Ponorogo mempunyai lima program, yaitu Ponorogo Taqwa, Cerdas, Sehat, Makmur dan Ponorogo Peduli. Di dalam program Ponorogo Peduli, salah satunya terdapat program bedah rumah, plesterisasi lantai, juga bantuan biaya hidup untuk lansia.

---

<sup>1</sup> Asvin Abdurrahman, Wawancara, Ponorogo, 4 Januari 2024

Kami menerapkan program program yang memang dapat menyentuh masyarakat secara langsung”

Program bedah rumah sudah sejak lama dijalankan oleh Baznas Ponorogo bahkan beberapa kali kolaborasi dengan Baznas Jatim dan Baznas RI, disampaikan oleh Bapak Asvin, sebagai berikut:<sup>2</sup>

“Program bedah rumah Baznas Ponorogo sudah sejak lama dilakukan mungkin dulu belum banyak yang bisa merasakan, tetapi bertahap program ini kami buat rutin tiap bulan pasti ada penyaluran. Bahkan kami bekerjasama dengan Baznas Propinsi Jawa Timur dan Baznas RI.”

---

<sup>2</sup> Ibid

Program plesterisasi lantai baru dimulai di tahun 2022, di saat pemerintah daerah Ponorogo membutuhkan percepatan penyediaan hunian layak untuk masyarakat miskin, disampaikan oleh Bapak Asvin, sebagai berikut:

“Program plesterisasi lantai awalnya inisiasi Bapak Bupati yang berkomunikasi dengan Baznas Ponorogo. Sehubungan dengan data diakhir tahun 2021 bahwa ada 17.000 rumah belum terplester atau masih beralaskan tanah di Ponorogo sehingga perlu adanya percepatan pembangunan penyediaan hunian layak.”

Untuk mengajukan program bedah rumah dan plesterisasi lantai, dilakukan oleh

pemerintah desa/kelurahan tempat tinggal calon penerima manfaat, seperti disampaikan Bapak Asvin, sebagai berikut:<sup>3</sup>

“Pemerintah desa/kelurahan merupakan strata pemerintah paling dekat dengan tempat tinggal mustahik. Sehingga berkas pengajuan dan persyaratan lainnya disiapkan oleh pemerintah desa karena banyak masyarakat yang masih awam akan administrasi, sehingga Baznas berkomunikasi dengan pemerintah desa/kelurahan untuk membantu warganya yang ingin mendapatkan bantuan rumah layak huni ataupun pemerintah desa/kelurahan berinisiatif untuk mengajukan bantuan bagi

---

<sup>3</sup> Ibid

warganya yang rumahnya sudah tidak layak huni”

Jadi pengajuan bantuan ke Baznas itu ada yang mustahiknya mengurus sendiri ke kantor desa, dan ada yang diusulkan oleh perangkat desa. Ada berkas atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan, seperti dikatakan oleh Nur Arifin, staf pendistribusian Baznas Ponorogo, sebagai berikut:<sup>4</sup>

“Untuk program bedah rumah dan plesterisasi lantai harus melengkapi persyaratan seperti contoh antara lain, surat pengajuan, surat keterangan fakir miskin, data pribadi (fotokopi KTP dan KK) dan foto

---

<sup>4</sup> Nur Arifin, Wawancara, 5 Januari 2024



rumah tinggal. Semua persyaratan dikumpulkan di pihak desa atau diserahkan langsung ke kantor Baznas.”

Proses berikutnya setelah pengajuan adalah pengecekan berkas, survey lokasi dan berikutnya penentuan layak atau tidaknya melalui rapat pleno Pimpinan, diterangkan Nur Arifin, sebagai berikut:<sup>5</sup>

“Setelah berkas masuk ke kantor kami cek terlebih dulu kelengkapan berkasnya, setelah itu tim survey akan meninjau lokasi, melaporkan hasil survey kedalam rapat pleno Baznas untuk selanjutnya ditentukan layak/tidak untuk dibantu.”

---

<sup>5</sup> Ibid

Berkas administrasi yang masuk ke kantor Baznas di cek dulu kelengkapannya, setelah lengkap bisa dilanjutkan proses survey ke lapangan, jika tidak lengkap maka bagian administrasi Baznas akan menghubungi nomer handphone yang tertera di surat pengajuan untuk segera melengkapi berkasnya.

Untuk calon penerima manfaat terdapat kriteria yang memang harus dipenuhi selain persyaratan administrasi, dijelaskan oleh Sukarni, Kepala Pelaksana Baznas, sebagai berikut:<sup>6</sup>

“Calon penerima bantuan haruslah orang yang memenuhi beberapa kriteria yaitu termasuk dalam golongan 8 (delapan) asnaf, rumah

---

<sup>6</sup> Sukarni, Wawancara, 22 April 2024

yang di huni tingkat kerusakannya parah sehingga bisa membahayakan penghuninya, Untuk hunian yang terdampak bencana ambruk, kebakaran, dan tanah longsor kita dahulukan karena mengalami kerusakan yang berat.”

Setelah dinyatakan layak atau di ACC untuk dibantu, maka tahapan selanjutnya adalah sosialisasi, dikatakan Nur Arifin, sebagai berikut:<sup>7</sup>

“Calon penerima manfaat yang sudah dinyatakan layak dibantu dikumpulkan bersama dengan perangkat desa/kelurahannya, untuk selanjutnya menerima penjelasan tentang bagaimana pelaksanaan program, monitoring, laporan,

---

<sup>7</sup> Nur Arifin, Wawancara, 5 Januari 2024

dokumentasi dan periode program. Untuk program plesterisasi yang dikumpulkan perangkat desa/kelurahan karena jumlahnya lebih dari 2 dalam satu desa/kelurahan. Bahkan sosialisai dilakukan di salah satu kecamatan untuk menghadirkan perangkat desa/kelurahan setempat”

## **2. Pelaksanaan**

Calon penerima bantuan hunian layak, diberi jadwal pengiriman material sesuai dengan RAB yang sudah dibuat. Untuk pembelanjaan material Baznas Ponorogo telah melakukan MOU dengan salah satu toko bangunan di Ponorogo, seperti disampaikan oleh Bapak Asvin, sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Asvin Abdurrahman, Wawancara 4 Januari 2024

“Baznas bekerja sama secara tertulis dengan salah satu toko bangunan di Ponorogo dengan pertimbangan harga wajar dan terjangkau serta jaminan barang dapat diantar sampe ke masing masing rumah calon penerima manfaat”

Proses selanjutnya pengerjaan program hunian layak baik itu bedah rumah ataupun plesterisasi lantai diserahkan ke panitia atau perangkat desa setempat, Hal ini disampaikan oleh Nur Arifin, sebagai berikut:<sup>9</sup>

“Setelah material dikirim dan uang untuk membantu ongkir pekerja sudah diserahkan, maka selanjutnya adalah penjadwalan pembongkaran rumah atau pengerjaan. Waktu

---

<sup>9</sup> Nur Arifin, Wawancara, 5 Januari 2024

pengerjaan ini menyesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat masing-masing. Biasanya ada beberapa penerima manfaat/mustahik yang menunggu hitungan hari baik untuk memulai pelaksanaan.”

Dalam proses pelaksanaan, Baznas selalu melibatkan dan mengajak masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal untuk mau turut serta membantu, diungkapkan oleh Bapak Asvin, sebagai berikut:<sup>10</sup>

“Dana yang dibantu Baznas sangat terbatas, sehingga memang diperlukan partisipasi aktif masyarakat sekitar untuk turut bergotong royong dalam pelaksanaan program penyediaan hunian layak baik itu

---

<sup>10</sup> Asvin Abdurrahman, Wawancara 4 Januari 2024

program bedah rumah maupun plesterisasi lantai. Untuk wilayah pedesaan untuk mengajak warga sekitar bergotong royong sangat mudah karena rasa kepedulian terhadap tetangga juga sangat besar. Tetapi sebaliknya, jika penerima manfaat tinggal di perkotaan sangat sulit untuk mengajak masyarakat lingkungan sekitar untuk bergotong royong. Karena kebanyakan tetangga bekerja dan rasa kepedulian terhadap tetangga juga kurang.”

Jika sudah bertemu hari baik dan masyarakat sekitar sudah longgar waktunya, di daerah pedesaan pelaksanaan program bisa segera dilakukan. Sedangkan untuk mustahik yang tinggal di perkotaan dengan gotong royong yang minim, maka disarankan untuk

mencari tukang bangunan. Hal ini seperti disampaikan oleh Nur Arifin, sebagai berikut:<sup>11</sup>

“Untuk daerah kota, sudah kami sarankan panitia akan mencari tukang bangunan, jika memang tidak ada kerabat dari penerima bantuan yang bisa mengerjakan. Tentu ada biaya yang harus dikeluarkan dan dipikirkan oleh penerima bantuan”

Dana pendamping terkadang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan program penyediaan hunian layak, seperti diungkapkan Bapak Sukarni, sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Nur Arifin, Wawancara, 5 Januari 2024

<sup>12</sup> Sukarni, Wawancara, 22 April 2024



“Dalam pelaksanaan program bedah rumah ataupun plesterisasi terkadang ada calon penerima yang memang sudah menabung tapi belum mencukupi untuk merenovasi rumahnya, sehingga mereka sangat bersyukur ketika mendapatkan bantuan dan tabungannya bisa untuk menambah biaya menrovasi rumah.”

### **3. Monitoring**

Bantuan Baznas berupa bedah rumah dan plesterisasi lantai ini secara tidak langsung merupakan stimulus tumbuhnya kepedulian, seperti disampaikan oleh Bapak Edi, sebagai berikut:<sup>13</sup>

“Sebenarnya kalau yang kami rasakan Baznas itu menggugah rasa

---

<sup>13</sup> Edi Kamituwo, Wawancara, 6 Januari 2024

kepedulian dan kepekaan masyarakat sekitar. Kami juga tidak keberatan untuk mengkoordinir warga untuk bersama sama saling membantu dengan tenaga demi lancarnya pelaksanaan di hari H.”

Bentuk kepedulian masyarakat ini bukan hanya dalam tenaga aktif, melainkan ada yang secara individu ikut andil menyiapkan konsumsi, air mineral dan lainnya, Bapak Asvin menyampaikan sebagai berikut:<sup>14</sup>

“Ada di daerah tertentu yang lurahnya aktif menggalang dana ke masyarakat sekitar yang memang dianggap mampu menyumbangkan materi uang, jadi selain tenaga,

---

<sup>14</sup> Asvin Abdurrahman, Wawancara 4 Januari 2024

konsumsi, ada juga yang membantu berupa uang atau bahkan bahan bangunan. Tergantung dari perangkat desa/kelurahan yang ditinggali oleh mustahik.”

Bantuan bantuan tersebut tentu akan menambah semangat dan meningkatnya rasa kebersamaan dan meningkatkan jiwa sosial masyarakat sekitar.

Dalam pelaksanaan Baznas selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah desa/ kelurahan, terkadang dengan Camat juga. Seperti disampaikan Bapak Sukarni, sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Selalu kami upayakan untuk komunikasi dan koordinasi dengan

---

<sup>15</sup> Ibid

Camat sekaligus pemerintah desa/kelurahan setempat. Sehingga seringkali di setiap kegiatan bedah rumah dibantu oleh BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS.”

Pelaksanaan program penyediaan hunian layak ini harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu, seperti di ungkapkan Nur Arifin sebagai berikut:<sup>16</sup>

“Pelaksanaan program penyediaan hunian layak ini ada batas waktu dalam pengerjaan nya, mulai start hingga finishing kurang lebih satu bulan. Selama proses pengerjaan pihak kami Baznas akan sesekali berkunjung untuk memantau dan memonitoring jalannya program, jadi tetap dalam pantauan kami sampai selsai bahkan

---

<sup>16</sup> Nur Arifin, Wawancara, 5 Januari 2024

sampai kelengkapan untuk laporan sudah terpenuhi.”

Dalam jangka waktu 1 bulan pengerjaan, pelaksanaan program akan selalu di pantau dan di monitoring oleh Baznas dan komunikasi dengan panitia selalu intens dilakukan. Artinya monitoring selalu dilakukan oleh tim hingga pelaksanaan program selesai.

Ada dokumen yang harus di lengkapi selama masa monitoring yang nantinya akan dipakai sebagai kelengkapan laporan pertanggung jawaban, antara lain kondisi 0%, *progress* 50% dan 100%, seperti dijelaskan Nur Arifin sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid.

“Baznas selalu berkomunikasi dengan perangkat/ panitia pelaksana program tentang *progress* pelaksanaan. Apakah ada kendala, atau kekurangan apa di lapangan.”

Untuk lebih fokus dalam monitoring dan pelaporan ada pembentukan tim dalam pelaksanaan program penyediaan hunian layak, diungkapkan oleh Bapak Asvin, sebagai berikut:<sup>18</sup>

“Kalau untuk program bedah rumah rutin, biasanya tim kami cukup dari bagian pendistribusian mulai dari kepala pelaksana sampai staf. Tetapi program yang bersinergi dengan pihak luar baik Baznas Provinsi Jawa Timur, Baznas RI, maupun Pemerintah

---

<sup>18</sup> Asvin Abdurrahman, Hasil Wawancara Waka II Baznas Ponorogo. 4 Januari 2024

Kabupaten Ponorogo kami membentuk tim khusus karena berkaitan dengan deadline waktu pengerjaan dan pelaporan yang biasanya antara pencairan dan deadline pengerjaan sangat mepet.”

#### **4. Evaluasi**

Tahap akhir dari pelaksanaan program penyediaan hunian layak adalah peresmian, seperti diceritakan oleh Bapak Asvin sebagai berikut: <sup>19</sup>

“Setelah pelaksanaan selesai, tidak semua rumah yang sudah jadi di resmikan oleh Baznas. Perkecualian seperti tahun 2022 ada 22 rumah yang diresmikan oleh Gubernur Jatim Indah Parawansa dan Baznas Propinsi Jawa

---

<sup>19</sup> Asvin Abdurrahman, Wawancara 4 Januari 2024

Timur, di desa Talun, Kecamatan Ngebel. Terkadang juga ada rumah yang diresmikan oleh Bupati Ponorogo didampingi Ketua dan pimpinan Baznas Ponorogo.”

Di setiap peresmian oleh Bupati Ponorogo, selalu didampingi oleh pimpinan Baznas Ponorogo, perangkat desa setempat dan masyarakat sekitar rumah penerima program, dibuat acara ceremonial sederhana biasanya dibarengi dengan penyerahan bantuan program lainnya

Selanjutnya setelah rumah jadi atau selesai proses pembangunannya, biasanya



akan dilakukan evaluasi, seperti diterangkan oleh Nur Arifin sebagai berikut:<sup>20</sup>

“Setelah semua pelaksanaan selesai, maka tim kami akan melakukan evaluasi mulai dari awal pengajuan, pelaksanaan dan monitoring. Sehingga bisa terungkap semua kendala dan hambatan yang terjadi selama kegiatan berlangsung hingga selesai. Evaluasi tersebut bisa menjadi tolak ukur kegiatan penyediaan hunian layak berikutnya. “

Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk menjadi bahan pertimbangan kegiatan penyediaan hunian layak berikutnya. Hal yang baik dipertahankan dan yang kurang bisa segera diperbaiki.

---

<sup>20</sup> Nur Arifin, Wawancara, 5 Januari 2024

Ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program penyediaan hunian layak ini, seperti diceritakan oleh Bapak Sukarni, sebagai berikut:<sup>21</sup>

“Dalam menjalankan kegiatan atau program pasti ada faktor yang mendukung dan menghambat. Termasuk pelaksanaan program hunian layak ini. Walaupun di setiap akhir program kami selalu evaluasi, ternyata masih ada saja yang kurang.”

Penyediaan hunian layak bisa berjalan sesuai tujuan bersama dikarenakan

---

<sup>21</sup> Sukarni, Wawancara, 22 April 2024

ada faktor yang mendukung, seperti di ceritakan Bapak Asvin, sebagai berikut:<sup>22</sup>

“Keberadaan tim Baznas dan relawan Baznas yang kompak berpengaruh untuk mengawal program dari awal sampai akhir. Panitia dari perangkat desa yang full semangat dan support juga menjadi faktor yang mendukung. Selain itu gotong royong warga sekitar rumah mustahik menjadi penentu 80% keberhasilan program ini.”

Diantara faktor yang menghambat berasal dari calon penerima bantuan, pemerintah desa atau RT bahkan bisa dari

---

<sup>22</sup> Asvin Abdurrahman, Hasil Wawancara Waka II Baznas Ponorogo.11 Januari 2024

masyarakat sekitar, seperti diungkapkan Bapak Sukarni, sebagai berikut:<sup>23</sup>

“Faktor penghambat ada beberapa, diantaranya yang pertama kurangnya partisipasi aktif masyarakat terutama masyarakat sekitar calon penerima bantuan yang tinggal di perkotaan. Di kota itu kan mayoritas masyarakatnya bekerja kantoran, sehingga berangkat pagi pulang sore. Jadi kalau di kota panitia harus bantu cari tukang bangunan atau kerabat dari mustahik. Kalau kebetulan kerabatnya ada yang bisa nuking malah bisa ngurangi anggaran biaya tukang dan bisa dipakai untuk nambah material.”

Faktor penghambat berikutnya yaitu surat kepemilikan tanah bukan milik

---

<sup>23</sup> Ibid

pribadi mustahik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sukarni sebagai berikut:<sup>24</sup>

“Surat kepemilikan tanah atau SHM masih atas nama orang banyak, atau milik orang tua yang sudah meninggal. Sehingga diperlukan data data pendukung dari mustahik disaksikan kerabat dan pejabat kelurahan.”

SHM yang masih milik orang banyak tidak harus langsung di pecah mencari sertifikat sendiri, seperti disampaikan oleh Bapak Joko Susetyo, sebagai berikut:<sup>25</sup>

“Kebetulan mustahik di wilayah kelurahan kami SHM nya masih

---

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Joko Susetyo, Wawancara, 5 Januari 2024

milik bersama jadi dibutuhkan surat pernyataan dan surat persetujuan dari semua ahli waris yang terlibat atau yang mewakili. Jika semua setuju dan tanda tangan di atas materai maka kelurahan berani melanjutkan penerimaan program hunian layak. Karena ada kasus, keluarga nya ada yang tidak setuju akhirnya program dialihkan ke orang lain.”

Lokasi rumah penerima bantuan atau mustahik yang sulit dijangkau juga

menjadi salah satu faktor penghambatnya, diterangkan oleh Nur Arifin, sebagai berikut:<sup>26</sup>

“Yang susah itu kalau rumah orangnya/mustahik itu pelosok atau bahkan pegunungan, sehingga truk/kendaraan pengangkut material akan kesulitan mencapai lokasi. Sehingga material harus dilangsir supaya bisa mendekati lokasi rumah yang akan di bangun/ di renovasi.”

Yang menjadi hambatan berikutnya adalah jumlah SDM Baznas Ponorogo yang terbatas, seperti diceritakan oleh Bapak Asvin, sebagai berikut:<sup>27</sup>

“Jumlah staf bagian pendistribusian sangat minim,

---

<sup>26</sup> Nur Arifin, Wawancara, 12 Januari 2024

<sup>27</sup> Dr. Asvin Abdurrahman, Hasil Wawancara Waka II Baznas Ponorogo. Wawancara, 11 Januari 2024

sehingga untuk membantu terlaksananya program bedah rumah ini sampai selesai adalah relawan Baznas. Relawan ini dimasukkan dalam tim sehingga proses dilapangan menjadi lebih ringan.”

Selanjutnya hambatan biasanya berasal dari mustahik itu sendiri yang utamanya berkaitan dengan kepercayaan, seperti diceritakan Bapak Sukarni sebagai berikut :<sup>28</sup>

“Penerima program atau mustahik yang tinggal kota ataupun desa masih memegang teguh kepercayaan dan budaya lokal. Terutama yang kaitannya dengan memilih hari baik untuk memulai

---

<sup>28</sup> Sukarni, Wawancara, 22 April 2024

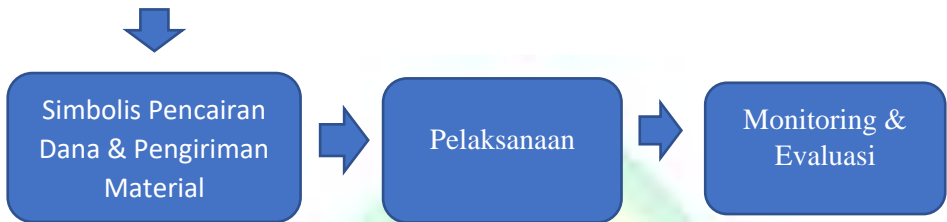


pembongkaran rumah. Sehingga terkadang deadline laporan menjadi molor.”

## **B. Analisis Data Komunikasi antara Baznas, Pemerintah dan Masyarakat Ponorogo dalam Penyediaan Hunian Layak**

Pada pembahasan ini, peneliti akan menjabarkan alur komunikasi yang terjadi pada pelaksanaan program penyediaan hunian layak bagi mustahik, yang bisa dijelaskan dengan diagram alur dibawah ini:





**Gambar 4.1**

## **Alur Program Bantuan Hunian Layak.**

### **1. Perencanaan**

Dari gambar alur program bantuan diatas sudah tergambar jelas mulai dari pengajuan berkas, verifikasi berkas, survey lokasi dan pleno. Jika hasil pleno disetujui maka berikutnya adalah sosialisasi program dan pembentukan panitia. Dalam tahap ini biasanya full tutorial artinya sudah ada contoh

surat pengajuan dan penjelasan lainnya sehingga biasanya berjalan efisien dan cepat.

Tetapi dalam tahap ini juga terdapat hambatan, biasanya berupa perbedaan dialek/ bahasa walaupun sangat jarang terjadi tetapi ada hambatan lain yaitu kondisi fisik mustahik terkadang ada yang usianya sudah lanjut dan mengalami kurang pendengaran sehingga perlu penterjemah.

Di lapangan, komunikasi antara pemerintah desa/ kelurahan ke calon penerima bantuan juga ada yang bermasalah atau mengalami hambatan. Ketika sosialisasi program yang hadir hanya perangkat desa/ kelurahan dan calon penerima bantuan tidak hadir, nah di sini sering terjadi miss karena

perbedaan persepsi. Hal yang sering membuat belum jelas adalah bahwa bantuan bedah rumah total senilai Rp.20.000.000,- itu terbagi atas Rp. 15.000.000,- berupa material sesuai dengan RAB yang diberikan dan Rp. 5.000.000,- berupa uang untuk bantuan operasional atau ongkos tukang. Terkadang perangkat desa/ kelurahan menyamakan bantuan dari Baznas ini dengan bentuk bantuan program yang sama tapi dari instansi yang berbeda, yang itu ketentuan dan prosedurnya juga berbeda. Hal tersebut diakibatkan karena di awal berkomunikasi sedikit mengabaikan, karena merasa warganya sudah pernah ada yang mendapatkan program serupa.

Seperti yang kami sajikan di data bahwa kendala komunikasi lainnya yaitu baru diketahui jika SHM rumah yang akan di perbaiki masih milik orang banyak atau keluarga besar. Sehingga diperlukan langkah strategis dan bijaksana pemerintah desa/kelurahan untuk mencari solusi dengan mengumpulkan keluarga terkait dan menyelesaikannya secara tertulis dan bermaterai. Hal ini di lakukan untuk menegah hal yang tidak diinginkan dikemudian hari diantara keluarga mustahik sendiri.

## **2. Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi**

Dilihat dari diagram di atas, setelah hasil pleno di setuju maka dilanjutkan dengan pelaksanaan program yaitu dengan simbolis

pencairan dana dan pengiriman material, sehingga program bisa mulai dilaksanakan.

Pelaksanaan program penyediaan hunian layak ini berpedoman pada prinsip manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.<sup>29</sup>

Komunikasi adalah kunci pokok suatu program bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Komunikasi yang dibangun oleh Baznas dengan pemerintah daerah dan masyarakat seperti yang sudah peneliti sajikan datanya berjalan efektif walaupun tidak selalu berjalan mulus. Sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa komunikasi itu dapat

---

<sup>29</sup> Candra Wijaya, dan Muhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen*. (Medan: Perdana Publishing, 2016)

dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh penerima pesan. Pesan atau informasi dari Baznas dipahami oleh perangkat desa dan mustahik, yang pemahamannya sama persis dengan informasi diawal. Kemudian pesan ini ditindaklanjuti dengan adanya perbuatan secara sukarela oleh yang menerima pesan, sehingga bisa mewujudkan apa yang terdapat di dalam pesan.<sup>30</sup>

Komunikasi yang terjadi antara Baznas, pemerintah dan masyarakat termasuk komunikasi eksternal, yang bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis untuk

---

<sup>30</sup> Deddy Mulyana, *Komunikasi Efektif*. (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2008),

mencapai tujuan bersama. Dari rangkaian pelaksanaan program perlu adanya pengawasan/ monitoring, dengan mengadakan pemeriksaan, pencocokan dengan usulan serta mengusahakan agar program tetap berjalan sesuai rencana hingga tujuan bersama tercapai.<sup>31</sup>

Keberhasilan program penyediaan hunian layak, didukung oleh faktor faktor di antaranya tim Baznas dan relawan yang kompak, begitu juga tim panitia perangkat desa/ kelurahan yang full support mengawal program hingga selesai termasuk membantu dokumentasi untuk kelengkapan pelaporan.

---

<sup>31</sup> M.Anang Firmansyah, dan Budi W.Mahardhika, *Pengantar Manajemen*,. (Yogyakarta: DeepPublish, 2018)




Selain faktor yang mendukung adalah gotong royong masyarakat sekitar rumah mustahik.

Di dalam pelaksanaan program penyediaan hunian layak ditemukan hambatan hambatan komunikasi yaitu hambatan fisik atau jarak yang jauh dengan rumah calon penerima bantuan, karena kondisi geografis yang menyebabkan susah signal, sehingga komunikasi dengan handphone juga sulit. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan effort yang lebih besar, Antara lain tim dari Baznas harus meluangkan waktu untuk datang ke lokasi dan bertemu dengan pemerintah desa setempat sekaligus dengan calon mustahik nya. Hambatan geografis juga timbul utamanya karena lokasi dan medan yang sulit

ditempuh untuk mencapai titik rumah mustahik. Sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menjangkau, terkadang waktu kerja sehari hanya bisa digunakan untuk ke satu lokasi saja. Efeknya untuk tim Baznas harus pintar memanager waktu mengatur jadwal agar semua pekerjaan dan tanggung jawab lainnya bisa terkondisikan dengan baik.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Asvin Abdurrahman, Hasil Wawancara Waka II Baznas Ponorogo. 15 Mei 2024



**BAB V**

**KOLABORASI BAZNAS , PEMERINTAH DAN**

**MASYARAKAT**

**A. Data Pola Kolaborasi antara Baznas,  
Pemerintah dan Masyarakat Ponorogo dalam  
Penyediaan Hunian Layak**

Pelaksanaan program penyediaan hunian layak di Baznas Ponorogo tidak berjalan sendirian melainkan bekerja sama dengan

pemerintah dan masyarakat, diterangkan Bapak Asvin sebagai berikut:<sup>1</sup>

“Dalam program penyediaan hunian layak di Kabupaten Ponorogo, Baznas Ponorogo tidak bekerja sendirian, melainkan berkolaborasi dengan pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten , pemerintahan kecamatan maupun pemerintahan desa/kelurahan dan masyarakat.”

### **1. Kolaborasi Baznas dengan pemerintah**

Penyediaan hunian layak dilaksanakan secara kolaborasi antara Baznas Ponorogo, pemerintah daerah dan masyarakat. Sehingga dapat terwujud tujuan bersama dengan mudah dan lancar. Kolaborasi ini

---

<sup>1</sup> Ibid

dilakukan sejak sebelum program dilaksanakan, seperti diterangkan Nur Arifin sebagai berikut:<sup>2</sup>

“Sebelum pelaksanaan program Baznas Ponorogo selalu berkolaborasi dengan pemerintah desa/kelurahan untuk dapat membantu secara administrasi surat menyurat. Praktek di lapangan, kolaborasi ini ada yang berjalan mulus ada yang tidak. Pemerintah daerah ditingkatan paling bawah yakni pemerintah desa/kelurahan ada yang sangat perhatian terhadap warganya yang membutuhkan bantuan, sehingga berinisitif untuk mengajukan bantuan ke Baznas. Ada yang menunggu laporan dari warga alias jogo gawang,

---

<sup>2</sup> Nur Arifin, Wawancara, 12 Januari 2024

sehingga baru tahu kalau ada yang membutuhkan bantuan.”

Penyediaan hunian layak, utamanya di program plestrisasi lantai, Baznas juga berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten Ponorogo, dituturkan oleh Bapak Avin sebagai berikut:<sup>3</sup>

“Baznas sebagai lembaga pemerintah, harus selalu siap mendukung program pemerintah. lima pimpinan Baznas dipanggil Bapak Bupati, intinya beliau berharap banyak bazans dapat membantu program percepatan untuk rumah yang masih beralaskan tanah/bata. Menurut Beliau, jumlahnya di tahun 2021 ada

---

<sup>3</sup> Ibid

17ribu rumah yang belum terplester ( data dari dinas sosial dan BPS).”

Jumlah rumah yang belum terplester masih sangat banyak, sehingga kerja sama dengan epmerintah kabupaten mesti dilakukan, dijelaskan oleh Bapak Asvin, sebagai berikut:<sup>4</sup>

“Pemerintah Kabupaten memberi hibah Baznas Ponorogo, hibah tersebut digunakan untuk program plesterisasi. Jadi bisa dikatakan sumber dana di awal program plesterisasi lantai di tahun 2022 full dari pemkab Ponorogo , tetapi pelaksana di lapangan adalah Baznas Ponorogo.”

---

<sup>4</sup> Ibid

## **2. Kolaborasi Pemerintah dengan masyarakat**

Faktor pendukung program penyediaan hunian layak ini adalah semua pihak yang terlibat relatif kompak, disampaikan oleh Bapak Asvin sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan program, alhamdulillah semua pihak yang terlibat relatif kompak, sehingga ketika ada sedikit masalah di lapangan biasa sharing untuk dengan cepat menemukan solusinya. Karena kunci keberhasilan suatu pekerjaan adalah kerja sama dari semua pihak.”

Partisipasi masyarakat sekitar rumah tinggal mustahik juga penting, seperti diceritakan Bapak Sukarni sebagai berikut:



“Program bedah rumah dan plesterisasi lantai ini kan program sosial, jadi sangat membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sekitar . Program ini bisa menjadi stimulan tumbuh dan lestarnya semangat gotong royong dan solidaritas dari warga sekitar. Program bedah rumah akan berhasil jika partisipasi masyarakatnya tinggi.”

Untuk pelaksanaan Baznas ponorogo, pemerintah desa/kelurahan juga berkolaborasi dengan masyarakat sekitar tempat tinggal calon penerima bantuan, seperti dijelaskan Edi, sebagai berikut

“Ketika mendapat kabar warga saya ada yang menjadi calon penerima bantuan, saya langsung membentuk panitia dengan mengumpulkan pak RT

dan warga setempat yang tinggal di sekitar ruman calon penerima manfaat. Kebetulan kami tinggal di pedesaan, sehingga rasa keperduliaan masih tinggi dan semuanya bisa dikondisikan untuk bergotong royong membantu. “

Kolaborasi dengan masyarakat tidak selalu berjalan mulus, terutama untuk masyarakat yang tinggal di kota, seperti dijelaskan Joko Susetyo, sebagai berikut:<sup>5</sup>

“Program penyediaan bedah rumah dilingkungan perkotaan, masih mengalami kesulitan untuk berkolaborasi dengan masyarakat sekitar calon penerima manfaat. Sehingga diperlukan pendekatan pendekatan khusus, dan itupun biasanya hanya bersedia cawe cawe di

---

<sup>5</sup> Joko Susetyo, Wawancara, 24 Januari 2024

hari pertama pembongkaran rumah dan selanjutnya diteruskan oleh tukang bangunan.”

Bantuan dari tim pendamping dan relawan juga menentukan keberhasilan program ini, seperti disampaikan Nur Arifin sebagai berikut:

“Bantuan dari tim pendamping dan relawan bedah rumah atau plesterisasi lantai dari desa/ kelurahan sangat mebanu dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan program hingga menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk laporan.”

### **3. Kolaborasi Baznas dengan Baznas Propinsi Jatim, Baznas RI dan Pihak lain**

Dalam penyediaan hunian layak, Baznas Ponorogo juga berkolaborasi dengan Baznas Propinsi Jawa Timur dan Baznas RI, seperti dijelaskan oleh Bapak Asvin, sebagai berikut:<sup>6</sup>

“Karena jumlah hunian tidak layak di Kabupaten Ponorogo masih sangat banyak, maka untuk mempercepat program Baznas Ponorogo berkolaborasi dengan Baznas Propinsi Jawa Timur dan juga Baznas RI. Kami awali dengan berkomunikasi, pengajuan penyerapan program penyaluran ZIS dari Baznas Jatim maupun Baznas RI, sampai ada info ACC atau di setujui.”

---

<sup>6</sup> Asvin Abdurrahman, Wawancara 11 Januari 2024

Program plesterisasi lantai ini ternyata menarik perhatian dari Baznas Propinsi Jawa Timur, seperti di ceritakan oleh Bapak Asvin, sebagai berikut:<sup>7</sup>

“Waktu Baznas Propinsi Jawa Timur berkunjung ke Ponorogo, di sambut oleh Bapak Bupati di rumah dinas Beliau. Di momen itu Bapak Bupati bercerita kondisi masyarakat Ponorogo, utamanya masih banyaknya rumah yang belum terplester alias masih beralaskan tanah. Hal itu ditanggapi dengan baik oleh Ketua Baznas Jatim. Dan alhasil di bulan berikutnya dari Baznas Jatim membantu sebanyak 33 rumah, dengan pelaksana tetap Baznas Ponorogo.”

---

<sup>7</sup> ibid

Untuk program kolaborasi sampai hari ini baru bisa bersama pemerintah daerah dan masyarakat, seperti diterangkan Bapak Sukarni sebagai berikut:<sup>8</sup>

“Alhamdulillah Baznas Ponorogo sudah bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat, ke depan harapan kami Baznas bisa bekerjasama dengan BUMN melalui CSR nya, ataupun bekerja sama dengan pihak swasta dalam penyediaan hunian layak.atau bahkan bisa bekerja sama dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang ada di Ponorogo” .

---

<sup>8</sup> Sukarni, Wawancara, 22 April 2024

## **B. Analisis Data Kolaborasi antara Baznas, Pemerintah dan Masyarakat Ponorogo dalam Penyediaan Hunian Layak**

Kolaborasi merupakan proses kerja sama untuk mengeluarkan ide atau pendapat dan mencari solusi masalah bersama sama sehingga tercapai tujuan atau visi. Kolaborasi adalah kunci pemikiran kreatif. untuk mencapai hasil yang terbaik saat menyelesaikan masalah yang agak sulit.

Kolaborasi yang terjadi antara Baznas, pemerintah dan masyarakat Ponorogo dalam praktiknya adalah saling berbagi peran, saling memberi masukan dan saling melengkapi kekurangan. Baznas tidak bisa berjalan sendiri dalam menjalankan program, sehingga Baznas

butuh berkolaborasi dengan pihak lain yaitu pemerintah dan mustahik sebagai calon penerimanya agar program berjalan lebih efektif.

### **1. Kolaborasi Baznas dengan pemerintah**

Kolaborasi Baznas dengan pemerintah kabupaten Ponorogo sudah dimulai dari awal program bedah rumah, sekitar tahun 2019 . Dimulai dari pemerintahan paling bawah yakni desa/kelurahan. Sedangkan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri terus diupayakan setiap tahunnya. Baznas mengajukan bantuan dana hibah setiap tahun sesuai dengan tujuan untuk percepatan program penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, yang program itu



sejalan dengan program pemerintah kabupaten Ponorogo.<sup>9</sup>

Di tahun 2022 pengajuan dana hibah untuk program di peroleh Baznas Ponorogo sebesar 1 (satu) Milyar, Sesuai dengan data yang kami sajikan bahwa ditahun 2022 ada 666 rumah yang kami bantu dalam program plesterisasi lantai hasil kolaborasi Baznas, pemerintah dan masyarakat. Di tahun 2023 pengajuan hibah program dari pemkab Ponorogo, di beri 250.000.000 atau 161 rumah tidak layak huni bisa terplesterisasi, Jumlah ini di bulatkan menjadi 200 rumah dengan

---

<sup>9</sup> Dr. Asvin Abdurrahman, Hasil Wawancara Waka II Baznas Ponorogo. 15 April 2024

sumber dana tambahan berasal dari ZIS yang dikumpulkan Baznas Ponorogo.<sup>10</sup>

Di tahun 2024 hibah program belum di setujui karena banyak agenda pemerintah yang harus di dahulukan yakni agenda pileg, pilpres dan pilkada. Ketiadaan hibah program dari Pemkab Ponorogo cukup menjadi hambatan bagi kolaborasi ini, banyak rumah tidak layak huni harus tertunda untuk dibantu, utamanya untuk program plesterisasi.

Kolaborasi Baznas dengan pemerintah daerah dapat dikatakan bagus dan baik karena Baznas mendapatkan mendapatkan hibah dengan jumlah yang cukup besar

---

<sup>10</sup> Dokumentasi Laporan Tahunan dari Baznas Kabupaten Ponorogo yang diberikan pada tanggal 1 April 2024

sebagai pelaksana program pemerintah yang sejalan dengan program Baznas. Kolaborasi ini cukup membuat masyarakat kabupaten Ponorogo utamanya yang belum mengenal Baznas menjadi lebih tau akan keberadaan Baznas, artinya melalui program ini misi Baznas Ponorogo untuk penguatan kelembagaan cukup berhasil.

## **2. Kolaborasi Pemerintah dengan masyarakat**

Penyediaan hunian layak yang sudah berjalan sampai hari ini yang merupakan kolaborasi antara Baznas, pemerintah desa dan masyarakat berjalan cukup baik dan lancar. Walaupun dalam prakteknya masih mengalami kesulitan atau hambatan, yakni terdapat ketimpangan antara jumlah

pengajuan dan realisasi di lapangan. Jumlah masyarakat yang mengajukan program bantuan penyediaan hunian layak lebih banyak daripada yang di acc/di setuju karena ketersediaan dana yang terbatas dan harus berbagi dengan pendistribusian di program lainnya. Baznas kabupaten Ponorogo secara bertahap menyelesaikan permohonan bantuan tersebut, dengan rutin setiap bulan 2-4 rumah saja.<sup>11</sup>

Hambatan selain masalah pendanaan yaitu masih adanya rumah mustahik yang SHM nya bukan atas nama sendiri atau masih atas nama orang banyak. Sehingga diperlukan

---

<sup>11</sup> Dr. Asvin Abdurrahman, Hasil Wawancara Waka II Baznas Ponorogo. Wawancara 5 April 2024

pendekatan dan komunikasi intens dengan pihak keluarga yang terlibat. Pemerintah desa/kelurahan sebagai wakil pemerintahan di tingkatan terbawah melalui RT menjadi ujung tombak keberhasilan kolaborasi ini. Selama tidak ada konflik dan semua pihak mau memahami maka tujuan kolaborasi akan tercapai walaupun tetap ada syarat syarat dokumen yang harus dilengkapi sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

### **3. Kolaborasi Baznas Ponorogo dengan Baznas Propinsi Jatim, Baznas RI dan pihak lain**

Dikarenakan jumlah rumah tidak layak huni di Ponorogo masih banyak, maka Baznas Ponorogo berusaha mencari solusi dengan

pengajuan bantuan program yang sama ke Baznas Provinsi Jawa Timur maupun Baznas RI. Namun kolaborasi dengan Baznas RI dan Baznas Jatim kurang berjalan dengan baik karena komunikasi yang kurang intens. Meski begitu setiap tahun Baznas Ponorogo tetap mendapatkan jatah program penyediaan hunian layak walaupun tidak banyak, tetapi dapat membantu mengurangi jumlah pengajuan bantuan hunian layak.<sup>12</sup>

Untuk mewujudkan kolaborasi dengan pihak lain seperti LAZ atau BUMN melalui CSR nya Baznas masih mengalami kesulitan. Penyebab untuk LAZ yang ada di daerah/kabupaten, program mereka sudah di plotting

---

<sup>12</sup> Ibid

dari kantor pusat masing masing sehingga dalam prakteknya untuk berkolaborasi sangat sulit. Begitu juga dengan CSR BUMN, BUMN yang ada di daerah hampir semua nya mempunyai unit/ divisi pengelolaan infaq sendiri. Yang sampai sekarang masih ada yang belum berijin, artinya selain harus ada penertiban tentang ijin divisi pengelolaan infaq di BUMN, maka aturan negara tentang pengelolaan zakat di Indonesia harus terpusat di Baznas sesuai undang undang harus lebih banyak disosialisasikan.

Selain LAZ dan BUMN Baznas Ponorogo sampai hari ini berupaya untuk terus berkomunikasi baik secara langsung dengan bersilaturahmi dengan instansi vertikal.

Walaupun ketika besilaturahmi kebanyakan tidak bertemu dengan pimpinan nya sehingga surat tidak ditanggapi.

Kolaborasi ini juga kemungkinan blm terwujud karena karena kurangnya kepercayaan terhadap lembaga Baznas itu sendiri. Sehingga sosialisasi dan penguatan kelembagaan terus dilakukan melalui media website, media sosial Instagram, youtube dan juga terkadang wawancara dengan radio lokal untuk terus mengedukasi masyarakat dan pihak pihak lain yang belum paham tentang Baznas.



## **BAB VI**

### **DAMPAK SINERGISITAS**

#### **A. Data Dampak Sinergisitas antara Baznas, Pemerintah dan Masyarakat Ponorogo dalam Penyediaan Hunian Layak**

Program penyediaan hunian layak Baznas Ponorogo yang dilaksanakan secara sinergi dengan pemerintah dan masyarakat, dalam bentuk bedah rumah dan plesterisasi lantai pasti berdampak secara berkelanjutan bagi masyarakat kabupaten Ponorogo. Sesuai dengan misi Baznas Ponorogo di poin nomor 5 yaitu memaksimalkan peran Zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Ponorogo melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga

terkait.<sup>1</sup> Maka wujud nyatanya adalah di dua program tersebut di atas.

Dengan adanya Baznas Kabupaten Ponorogo maka jumlah masyarakat miskin di kabupaten Ponorogo akan berkurang, dan akan semakin banyak masyarakat yang kekurangan terbantu. Partisipasi aktif ASN dalam membayar ZIS nya ke Baznas sangat mempengaruhi pendistribuangannya. Semakin banyak dana ZIS yang dikumpulkan maka penyaluran dana ZIS untuk kepentingan sosial semakin banyak juga.

Penyaluran dana ZIS, akan memberikan dampak bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu penyaluran ZIS yaitu program penyediaan hunian

---

<sup>1</sup> 'Http.Baznasponorogo.or.Idprofile-Baznas.Htm'. diakses pada tanggal 1 April 2024, pukul 21.30

layak juga akan berdampak pada pemberi zakat (muzakki) dan kepada penerima zakat (mustahik). Seperti di sampaikan oleh Bapak Asvin, sebagai berikut:<sup>2</sup>

“Keberadaan Baznas dalam menyalurkan dana ZIS sangat membantu muzakki untuk membersihkan hartanya dan membantu mustahik tercukup kebutuhannya dengan tidak perlu merasa malu. Bantuan penyediaan hunian layak ini juga diharapkan mampu meningkatkan ekonomi dan taraf hidup mustahik.”

---

<sup>2</sup> Dr. Asvin Abdurrahman, Waka II Baznas Ponorogo.  
Wawancara 11 Januari 2024

## **1. Dampak Positif Sinergisitas**

Dari hasil wawancara di atas diterangkan bahwa program bantuan penyediaan hunian layak dari Baznas Kabupaten Ponorogo memberi dampak positif bagi mustahik yakni terbantu secara perekonomian dan meningkatkan taraf hidupnya.

Mustahik penerima program juga akan merasakan dampak lainnya, seperti diceritakan oleh Bapak Sukarni sebagai berikut : <sup>3</sup>

“ Masyarakat yang mendapat bantuan program ini merasa lebih nyaman, yang tadinya terkadang ada yang kurang serawung ke tetangga karena minder sebab belum punya

---

<sup>3</sup> Sukarni, Wawancara, 22 April 2024

rumah layak. Sekarang setelah rumahnya direnovasi sudah mulai mau bersosialisasi dan mengikuti kegiatan warga karena kepercayaan dirinya bertambah.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu penerima bantuan, Bu Nyamirah sebagai berikut :<sup>4</sup>

“Dalem remen sanget, griyone saged di bangun maleh, saged damel ngiyub, mboten khawatir badhe ambruk maleh.”

Begitu juga pak Andi juga merasakan hal yang sama, diceritakan sebagai berikut :<sup>5</sup>

“Ini pertama kalinya saya dapat bantuan dari pemerintah, maturnuwun

---

<sup>4</sup> Nyamirah, Wawancara 7 Mei 2024

<sup>5</sup> Andi, Wawancara 30 April 2024

Baznas karena lantai rumah kami tidak tanah lagi, rumah kami lebih bersih dan rapi. Mudah mudahan banyak orang lain yang seperti saya bisa dibantu.”

Dampak positif berikutnya bagi mustahik adalah lebih nyaman hidupnya, meningkat rasa percaya dirinya sehingga lebih bisa berbaur dan bersosialisasi dengan tetangga kanan kirinya.

Mustahik penerima program, Bu Nyamirah juga menyampaikan hal sebagai berikut:<sup>6</sup>

“Kulo maturuwun kaliyan Pak Rt, mbah Wo kaliyan mbah Lurah sampun diusulkan program niki. Sedanten kulo manut, mboten saged maringi nopo nopo.”

---

<sup>6</sup> Nyamirah, Wawancara 7 Mei 20224

Dari pernyataan mustahik Bu Nyamirah, dapat diketahui bahwa keberadaan program ini menumbuhkan rasa semakin percaya terhadap aparat pemerintah mulai dari tingkatan paling bawah yaitu RT sampai di atasnya.

Bagi penerima bantuan masih ada dampak lain yang dirasakan seperti disampaikan oleh Bapak Sukarni sebagai berikut:<sup>7</sup>

“Program penyediaan hunian layak bagi mustahik ini bisa membantu mengurangi jumlah anak dengan pendidikan rendah. Karena tidak ada lagi mustahik yang berpikir mana yang harus didahulukan antara memperbaiki rumahnya atau menyelokahkan anaknya. Mustahik akan lebih fokus

---

<sup>7</sup> Sukarni, Wawancara, 22 April 2024

untuk menyekolahkan anak, karena rumah mendapat bantuan.”

Dari hasil wawancara tersebut maka di simpulkan bahwa bantuan penyediaan hunian layak biasa meningkatkan jenjang pendidikan anak anak mustahik menjadi lebih tinggi. Karena tingkat perekonomian keluarga dapat sedikit terbantu.

## **2. Dampak Negatif Sinergisitas**

Selain dampak positif ternyata program bantuan penyediaan hunian layak ini memberikan dampak negatif juga, seperti dijelaskan Bapak Sukarni sebagai berikut:<sup>8</sup>

“Bagi mustahik penerima , dampak negatif nya yakni muncul rasa

---

<sup>8</sup> Ibid



malas bekerja untuk mencukupi kebutuhan karena sudah mendapatkan bantuan, rasa bergantung ke pihak luar agar mendapat bantuan terus menerus. Sehingga sasaran penerima program bantuan utamanya dari Baznas kita seleksi betul sehingga tidak salah dan diberikan sesuai kebutuhan.”

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa program penyediaan hunian layak juga mempunyai dampak negatif yang dirasakan oleh mustahik yakni muncul rasa malas dan ketergantungan pada pihak lain. Sehingga Baznas harus benar benar selektif dalam menentukan sasaran dan memberi sesuai kebutuhan.

Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar rumah penerima bantuan ternyata ada negatifnya

juga, seperti diceritakan oleh Bapak Sukarni sebagai berikut :<sup>9</sup>

“Program bantuan penyediaan hunian layak berdampak negatif untuk warga sekitar atau tetangga penerima bantuan, Mereka ada yang terus terang menyatakan ada sedikit rasa iri dan cemburu ingin mendapatkan bantuan pemerintah juga walaupun dalam bentuk lain.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dampak negatif juga dirasakan oleh warga sekitar rumah penerima bantuan yaitu timbul rasa iri dan cemburu ingin mendapatkan bantuan juga.

---

<sup>9</sup> Sukarni, Wawancara, 22 April 2024

**B. Analisis Data Dampak Sinergisitas antara Baznas, Pemerintah dan Masyarakat Ponorogo dalam Penyediaan Hunian Layak**

Sinergisitas antara Baznas, pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan hunian layak sudah berjalan mulai program bedah rumah dilaksanakan, kurang lebih mulai tahun 2020 an. Meski belum banyak yang terbantu karena memang perbandingan yang mengajukan dengan yang direalisasi selisih cukup banyak. Apalagi kalau diliat dari yang rumahnya tidak layak huni tapi tidak mengajukan bantuan dengan berbagai alasan dan pertimbangan masih sangat banyak di Ponorogo. Yang mengajukan pun terkadang harus terpending karena dana yang terbatas dan harus

mendahulukan hunian yang terkena bencana ambruk, kebakaran atau terkena longsor.

### **1. Dampak Positif**

Meski demikian sinergi ini memberikan dampak yang luar biasa bagi Baznas bagi pemerintah daerah, dan bagi mustahiknya. Dampak positif yang bisa dirasakan antara lain:

1. Kekompakan tim relawan Baznas yang di tugaskan untuk mengawal program penyediaan hunian layak ini semakin teruji kompak
2. Komunikasi Baznas dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan menjadi lebih intens,

sehingga lebih akrab dan lebih saling memahami

3. Pemerintah kabupaten terbantu untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin dan mengurangi jumlah hunian tidak layak
4. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kabupaten semakin tinggi dengan adanya bantuan yang disalurkan dengan cara kolaborasi
5. Pemerintah desa/kelurahan semakin dipercaya oleh masyarakat sebagai penyambung ke tingkatan pemerintahan di atasnya untuk mendapatkan bantuan

6. Tingkat kepercayaan diri mustahik meningkat karena rumah yang dihuni hasil dari sinergi ini menjadi lebih layak dan mustahik lebih mau untuk bersosialisasi dengan tetangga sekitarnya
7. Tingkat pendidikan putra putri mustahik bisa lebih tinggi, karena mustahik tidak lagi memikirkan biaya untuk memperbaiki rumah dan bisa lebih fokus untuk membiayai sekolah anak
8. Tingkat ekonomi akan menjadi lebih baik karena terbuka peluang berkomunikasi dengan tetangga untuk mendapatlan info terbaru untuk

menambah penghasilan ataupun info lainnya.

9. Meningkatnya rasa peduli terhadap sesama dilingkungan terdekat tempat tinggal dan meningkatnya rasa kebersamaan sekaligus gotong royong untuk mencapai tujuan Bersama

## **2. Dampak Negatif**

Proses pelaksanaan sinergi ini juga memberikan dampak negatif, bagi pihak yang terlibat, antara lain:

1. Bagi Baznas ketika program penyediaan hunian layak terutama yang bentuknya plesterisasi lantai ataupun bedah rumah, utamanya yang berkolaborasi dengan pemerintah

kabupaten, Baznas Propinsi Jatim dan Bazanas RI butuh fokus karena dikejar deadline waktu pengerjaan dan laporan. Sehingga program lainnya sedikit terpending untuk sementara waktu

2. Bagi mustahik akan timbul rasa bergantung pada lembaga atau pemerintah agar mendapatkan bantuan dan muncul rasa berharap dibantu pihak yang lain juga
3. Masyarakat yang tinggal di sekitar penerima bantuan terkadang muncul rasa cemburu dan iri hati karena tidak mendapat bantuan



4. Mustahik akan berkurang etos kerjanya atau menjadi malas bekerja karena sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan mengandalkan bantuan lagi



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari paparan dan penjelasan peneliti mulai dari Bab I sampai dengan Bab V maka dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Komunikasi yang terjadi antara pihak Baznas, pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan hunian layak sudah berjalan efektif dan dilakukan secara sistematis mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Faktor yang mendukung adalah tim Baznas dan relawan yang kompak,

panitia dan perangkat desa/kelurahan dan juga masyarakat sekitar mustahik. Hambatan komunikasi karena faktor geografis yakni rumah mustahik yang di jangkau, faktor fisik mustahik yang usia lanjut, dan juga faktor kepercayaan lokal untuk menentukan hari baik.

2. Kolaborasi antara Baznas, pemerintah dan masyarakat menurut hasil penelitian juga sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam prakteknya kolaborasi ini di dukung oleh kekompakan semua pihak dan juga gotong royong masyarakat sekitar rumah musthaik. Kolaborasi menemui beberapa hambatan antara lain jumlah

yang mengajukan bantuan program penyediaan hunian layak lebih banyak daripada dana yang tersedia untuk program tersebut, faktor kepemilikan tanah SHM mustahik masih milik orang banyak, di perkotaan gotong royong tidak terwujud.

3. Dampak sinergisitas antara Baznas, pemerintah dan masyarakat ada 2 (dua) yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya bagi mustahik kepercayaan dirinya meningkat, tidak minder untuk bersosialisasi dengan tetangga, Selain itu jenjang pendidikan anak mustahik dimungkinkan bisa lebih tinggi, dan

kesejahteraan mustahik lebih meningkat karena rumahnya sudah layak. Sedangkan dampak negatifnya bagi mustahik muncul rasa malas bekerja dan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, sedangkan bagi tetangga sekitar mustahik muncul rasa cemburu dan iri hati karena ingin mendapat bantuan juga.

## **B. SARAN**

Dari hasil data penelitian dan analisa pembahasan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Baznas Ponorogo perlu optimalisasi ZIS sehingga dana yang di salurkan untuk program penyediaan hunian

layak ini bisa lebih besar sehingga bisa lebih banyak masyarakat yang terbantu

2. Baznas Ponorogo dan pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu meningkatkan komunikasi secara intens, sehingga setiap tahun dana hibah untuk program bisa lebih banyak
3. Komunikasi Baznas Ponorogo dengan Baznas Propinsi Jawa Timur dan Baznas RI juga harus ditingkatkan sehingga program nya bisa di distribusikan di kabupaten Ponorogo
4. Kolaborasi Baznas dengan pihak LAZ dan BUMN melalui CSR nya ke depan supaya segera diwujudkan, dengan

menertibkan LAZ dan lembaga  
pengelola zakat milik BUMN



## DAFTAR PUSTAKA

- '[Http.Baznasponorogo.or.Idprofile-Baznas.Htm](http://Baznasponorogo.or.id/profile-Baznas.Htm)'. diakses pada tanggal 1 April 2024. pukul 21.00.
- 'LAP BAZNAS-1.Pdf'. Annual Report Baznas 2023, Dokumentasi dari Baznas Kabupaten Ponorogo yang diberikan pada tanggal 2 Mei 2024.
- 'Laporan Badan Amil Zakat Nasional'. 2018.
- Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Adila Mina, Syaadah. *Analisis Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Program Bantuan Bedah Rumah*. Tak Layak Huni Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati, Jurnal Repository IAIN Kudus. 2021.



Ahmadi, Abu. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta:  
PT. Reneka Cipta, 2004.

Anderson, Elizabeth T. & Judith M.  
McFarlane, *Community as Partner:  
Theory and Practice in Nursing*. 4th  
Ed. Philadelphia, 2004.

Andi, Wawancara 30 April 2024.

Anggraeni, Wiwit. “*Sinergitas Kantor  
Wilayah Kementrian Agama Provinsi  
Bengkulu dan Badan Amil Zakat  
Nasional Provinsi Bengkulu dalam  
Pengelolaan Zakat*”. *Jurnal Hukum  
Islam dan Peradilan Qiyas*, Vol 3 No 1  
(2018).

Ardana, I Komang dkk, *Manajemen Sumber  
Daya Manusia*. Jakarta : Graha Ilmu,  
2012.

Arifin, Nur. Wawancara, 5 Januari 2024

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*.  
Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Arni, Muhammad. *Komunikasi  
Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara,  
2005.

AW, Suranto. *Komunikasi Interpersonal*.  
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Azwar. “Pengumpulan dan Pendistribusian  
Dana Zakat di Baznas Kabupaten  
Siak”. *Jurnal Kajian Manajemen  
Dakwah*. Vol.4 No.1(2022).

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian  
Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Basuki, Hibnu & R. Widodo. *Kerjasama  
Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan  
BAZNAS Kota Yogyakarta*, *Jurnal  
Ilmiah Multidisiplin Indonesia*. Vol. 2  
No. Special Issue 2 (2022).

Bungin, H. M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.

Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Carpenter, Mason. A. & Sanders, Wm, Gerard, *Strategic Management: A Dynamic Perspective*. 2nd Edition, (New Jersey: Pearson Printice Hall, 2009).

Departemen Agama, 'UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat'.

Dewan Pengurus Nasional Fordeby dan Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*.

Jakarta: PT aja Grafindo Persada,  
2016.

Diana, Wawancara Wakil Ketua IV Baznas  
Ponorogo. 20 Desember 2023.

Dokumentasi “Profil Lembaga” dari Baznas  
Kabupaten Ponorogo yang diberikan  
pada tanggal 1 April 2024.

Dokumentasi dari Baznas Kabupaten  
Ponorogo yang diberikan pada tanggal  
2 Mei 2024.

Dokumentasi dari Baznas Kabupaten  
Ponorogo yang diberikan pada tanggal  
1 April 2024.

Dr. Asvin Abdurrahman, Hasil Wawancara  
Waka II Baznas Ponorogo. 4 Januari  
2024

E.D, Rosen, *Improving Public Sector  
Productivity: Concept and. Practice.*  
(London: Sage Publications,

International Educational and Professional Publisher, 1993), h. 218-222.

Effendi. *Kepemimpinan dan Komunikasi*. Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996.

Effendy, Onong Uchajana. *Ilmu Komunikasi : Teori Dan Praktek*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Emily R.,Lai. 'Collaboration: A Literature Review'.2011,h.1-48.

Firmansyah, M.Anang. dan Budi W.Mahardhika, *Pengantar Manajemen*,. Yogyakarta: DeepPublish, 2018.

Gray,Barbara .*Collaborating: Finding Common. Ground for Multiparty Problems*,.( San Francisco: Jossey-Bass, 1989) h.329

H.A.W Widjaya. *Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997.

Handoko, Kristian. *Materi Umpan Balik Yang Cepat Dapat Diterapkan Pada Perusahaan*. Bandung: Pustaka Baru, 2006.

Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*. Yogyakarta: Penerbit Idea Pres, 2011.

Henry, N. *Public Administration and Public Affairs*. Sixth Edition. ( Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1995)

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humaika, 2014.

<http://kbbi.web.id/sinergi/> Diakses Tanggal 2 Mei 2024, jam 15.57.

[https://19design.wordpress.com/2011/04/23/mengenal-lebih-jauh-sistem-ventilasi.\(2023\)](https://19design.wordpress.com/2011/04/23/mengenal-lebih-jauh-sistem-ventilasi.(2023))

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Erlangga, 2009.

Janine and John Wanna, *Collaborative Governance: A New Era Of Public Policy In Australia?*. (Australia: ANU E Press. 2008) h.3

Jovi Andre Kurniawan dan Retno Surayawati, 'Sinergitas Antar Stakeholder Dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Di Kota Temanggung'. *Jurnal Wacana ublik*, no 1, 2017, 41. Diakses Pada Tanggal 2 Mei 2024

Kamituwo, Edi. Wawancara. 6 Januari 2024.

Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya .Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Khotijah ,Dewi. “*Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk Pemberdayaan Mustahiq pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin di BAZNAS Kabupaten Lumajang*”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Muhasabatun, Vol 20. No.2 (2020)

Kolaboratif Definition. *American Heritage Dictionary*. 4th Edition 2002.

Kusuma, Wijaya. *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.

Kusumastuti, Henny Prahima. dkk. “*Analisis Maqashid Syariah terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Dhuafa selama Pandemi Covid – 19 di Baznas*



Kabupaten Purwakarta, t Prosiding  
Keuangan & Perbankan Syariah, Vol.  
7. No.2, (2021).

L.L. Lindeke, and Sieckert, A.M, 'Nurse-  
Physician Workplace Collaboration.'  
OJIN: The online Journal of Issues in  
Nursing, 2005, Volume 10 Number 1,  
Manuscript 4

Mangkunegara. *Evaluasi Kinerja Sumber  
Daya Manusia*.Bandung: PT. Refika  
Aditama, 2007.

Marshall, Edward M. Transforming The Way  
We Work: The Power of the  
Collaborative Work Place,  
AMACOM. 1995.

Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian  
Kualitatif*. Bandung: Remaja  
Rosdakarya. 1995.

Muhammad Syaafi Muqorobin & Endang Kartini, *“Peran Baznas dalam Mensejahterakan Masyarakat dan Meningkatkan Perekonomian Di Kota Magelang”*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol 1 No.3 (2022)

Muhtadi. *“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Oleh Baznas”* Jurnal Kajian Islam dan pengembangan Masyarakat (Masyarakat Madani). Vol 7.No 2 (2022)

Mulyana. Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005).

Munandar. *Kreativitas Dalam Bekerja Untuk Meningkatkan Mutu*. Salatiga: Cipta Karya, 006.

Mungkasa, Oswar. *Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia, Direktorat Permukiman dan Perumahan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional* (BAPPENAS). Jakarta. 2008

Narwoko, J, Dwi. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: PrenadaMedia. 2004.

Nawawi, Hadari. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Ngalimun. *Strategi Dan Model Pembelajaran*. Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2016.

Noor, Ardian, dkk. “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Baznas Kota Malang Tahun 2020”. *Journal of Islamic Economics Development and Innovation*. Vol 1 No 2 (2022).

Noorsyamsa Djumara, *Negosiasi, Kolaborasi Dan Jejaring Kerja*. Jakarta:Lembaga Administrasi Negara-RI, 2008.

Nugraha,Akbar Pandu Dwi.‘Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan emerintahan Desa’. PUBLISIA. Jurnal Ilmu Administrasi Negara 2. no. 1 (2017). 25-26.

Nyamirah. Wawancara 7 Mei 2024

Pamudji, *Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah: Suatu Tinjauan Dari Segi Administrasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Parman, Ali. *Pengelolaan Zakat “Disertai Contoh Perhitungannya”*. Makassar: Alauddin pres 2012.

Pradana Shandy. *Definisi serta Kriteria Rumah Layak Huni dan Tidak*. Rumah 123.com (2023)

Pusat Bahasa. *Departemen Pendidikan Nasional*. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). Edisi III, 79.

Rahman, Abdur. “*Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat dan Wakaf dalam pembangunan ekonomi di Indonesia* “. Jurnal Al Kharaj Vol 1 Nomor 1.2021

Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin pres 2011.

Rini, Skripsi R Habsari Dian. ‘Pelaksanaan Komunikasi Eksternal Dalam Meningkatkan Jumlah Peserta Didik Baru Di SMK Muhammadiyah 1 Tempel.’ diakses pada tanggal 30 April 2024.

S. Djuarsa, Sendjaja. *Teori Komunikasi*, Universitas Terbuka. Jakarta. 2004.

S.l. Harjanta , “Corporate Social Responsibility, Program Bedah Rumah dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo”, Populika , Vol.7 No.2 (2019)

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),h. 91.

Santoso,Ardi. *Pengaplikasian Komunikasi Yang Efektif Di Perusahaan*. Yogyakarta: ertasono Press, 2011), h. 33-34.

Saputra, Jevi.”*Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dengan Program Bedah Rumah di Kota Jambi*”. Journal of Sharia Econmic Research. Vol.6 No 2(2022)

Sari, Kartika. *Koordinasi Dalam Komunikasi Efektif Terstruktur*. Bogor: PT. Pusaka, 002.

Setiawan Ardi Radhita.&Ertien Rining Nawangsari. *Dynamic Governance Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni*. Jurnal Kebijakan Publik. Vol. 14. No.1 (2023).

Shihab, Alwi. *Islam Inklusif*. Cet. V. Bandung: Mizan, 1999.

Shobab, Ahmad Nur.& Fuad Yanuar Akhmad Rifai. *Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 6 No.3 (2020).

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Sofyandi. *Macam-Macam Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Pustaka Setia, 2003.

Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik-Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.

Sudarmo. *Isu-Isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*. (SMART Media, MAP UNS, 2011).

Sukarni, Wawancara, 22 April 2024.

Susetyo, Joko. Wawancara, 5 Januari 2024

Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Insani*. Jakarta: Kencana, 2005.

Tim Editorial. 'Kriteria Rumah Layak Huni Dan Tidak Layak Huni Serta efinsinya'. (Rumah. Com by property guru, 2023).

Tito, Muhammad Arif. *Masalah Dan Hipotesis Penelitian Sosial-*



*Keagamaan*. Makassar: Andira  
Publisher, 2005.

Tjokroamidjojo. *Perencanaan Pembangunan*.  
Jakarta, Gunung Agung : 2008.

Triana Rahmayati dkk. 'Sinergitas  
Stakeholder Dalam Inovasi Daerah'.  
Jurnal Administrasi Publik (JAP) 2,  
no.4, 643. Diakses pada tanggal 2  
Mei2024.

Ujianto, Guntur. 'Analisis Pengaruh  
Komitmen Professional Terhadap  
Kepuasan Kerja aryawan Pada Bank  
Bukopin Yogyakarta'. Jurnal Sinergi  
Kajian Bisnis 2, no. 3 (2005), h. 93

Wahbah al-Zuhaili. *Zakat, Kajian Berbagai  
Madzhab*. Bandung: Remaja  
Rosdakarya, 997.

Wijaya, Candra. dan Muhammad Rifa'i,  
*Dasar-Dasar Manajemen*. Medan:  
Perdana Publishing, 2016.

Winarno, Bambang. *Evaluasi Program  
Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi  
Masyarakat Miskin di Kabupaten  
Belitung*. Jurnal Pengembangan Kota  
(The Review of Urban Studies and  
Development. Vol 6, No,1 (2018).

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian  
Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta:  
Pustaka Baru Press, 2018.

Wiratno, *Teori Koordinasi Dan Praktek*.  
Praktek. Jakarta: Gramedia Group,  
2004.

Wursanto. *Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi*.  
Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2005.

Yaffee, Steven L. and Julia Wondolleck,  
'Collaborative Ecosystem Planning

- Processes in the United States: Evolution and Challenges.'. (Jurnal Environments, 2003) h. 59–72.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.
- Yanggo, Huzaimah T. *Masail Fiqhiyah*. Cet I (Bandung: Angkasa, 2005).
- Yayat M, Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Grasindo, 2001.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Yusuf, Burhanuddin. *Manajemen Sumber Daya Insani*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Zainuddin. *Hukum Zakat 'Perspektif Normatif, Kesejahteraan Dan*

*Keadilan Sosial*'. Makassar: Alauddin  
Pers. 2013.

